



PENERBIT
Cahaya Abadi

**ANALISIS EKONOMI REGIONAL
BERDASAR MODEL *LOCATION*
QUOTIENT DAN SHIFT SHARE
DALAM PENENTUAN
LAPANGAN USAHA UNGGULAN
DI KEDIRI RAYA**



**Dr. Qomarul Huda, M.Ag
Drs. H. Timbul, M.Pd.I**

ANALISIS EKONOMI REGIONAL
BERDASAR MODEL *LOCATION QUOTIENT*
DAN *SHIFT SHARE* DALAM PENENTUAN
LAPANGAN USAHA UNGGULAN
DI KEDIRI RAYA



Dr. Qomarul Huda, M.Ag
Drs. H. Timbul, M.Pd.I

PENERBIT CAHAYA ABADI TULUNGAGUNG
TAHUN 2018

ANALISIS EKONOMI REGIONAL BERDASAR MODEL *LOCATION QUOTIENT* DAN *SHIFT SHARE* DALAM PENENTUAN LAPANGAN USAHA UNGGULAN DI KEDIRI RAYA

Oleh:

Dr. Qomarul Huda, M.Ag dan Drs. H. Timbul, M.Pd.I

Hak Cipta Dilindungi dengan Undang-Undang, dilarang keras mengutip, menjiplak, memfotokopi sbagian atau seluruh isi buku ini serta memperjualbelikannya tanpa izin tertulis dari Penerbit CAHAYA ABADI.

Diterbitkan oleh:

Penerbit CAHAYA ABADI

Email: ae_stainta@yahoo.co.id

Telp. 085234635471

Editor: Agus Eko Sujianto

Dr. Qomarul Huda, M.Ag dan Drs. H. Timbul, M.Pd.I

Analisis Ekonomi Regional Berdasar Model *Location Quotient* dan *Shift Share* dalam Penentuan Lapangan Usaha Unggulan di Kediri Raya; Dr. Qomarul Huda, M.Ag dan Drs. H. Timbul, M.Pd.I : editor, Agus Eko Sujianto – Tulungagung : Cahaya Abadi, 2018.
89 hlm. ; 25,71 cm

ISBN: 978-602-8569-62-0

Anggota Ikatan Penerbit Indonesia No. 121/JTI/2010

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Allah SWT penelitian yang berjudul “Analisis Ekonomi Regional Berdasar Model *Location Quotient* dan *Shift Share* dalam Penentuan Lapangan Usaha Unggulan di Kediri Raya” ini dapat diselesaikan. Kajian ekonomi regional menjadi kekuatan dalam penelitian ini serta menggunakan lokus penelitian di Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Nganjuk dan Kabupaten Blitar.

Secara umum hasil penelitian ini penulis persembahkan kepada insan-insan akademik yang membantu terselesaikannya penelitian ini yaitu: Rektor IAIN Tulungagung, Ketua LP2M IAIN Tulungagung, serta yang tidak kalah pentingnya yaitu keluargaku (isteri dan anak-anak tercinta) yang selalu mendoakan dan mendorong terselesaikannya penelitian ini. Smoga penelitian ini bermanfaat dan berkah. Aamiin Yaa Robbal ‘Alamiin.

Tulungagung, 2 Oktober 2018

Peneliti,

Dr. Qomarul Huda, M.Ag

DAFTAR ISI

	Halaman
Cover.....	i
Kata Pengantar.....	iv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. TUJUAN PENELITIAN.....	5
D. KONTRIBUSI AKADEMIK.....	6
BAB II: KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. LANDASAN TEORI.....	9
1. Hakekat Ekonomi Regional.....	9
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	10
3. Pertumbuhan Ekonomi.....	11
4. Pertumbuhan Ekonomi Regional.....	13
5. Indikator Pertumbuhan Ekonomi Regional.....	16
6. Teori Keunggulan Komparatif.....	18
7. Teori Keunggulan Kompetitif.....	19
8. Ekonomi Pembangunan.....	20
B. LANDASAN EMPIRIS.....	23
C. HIPOTESIS.....	27
BAB III: METODE PENELITIAN.....	29
A. RANCANGAN PENELITIAN.....	29
B. POPULASI, SAMPEL DAN TEKNIK SAMPLING.....	30
C. JENIS, SUMBER DAN PENGUMPULAN DATA.....	30
D. DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL DAN PENGUKURANNYA.....	31
E. ANALISIS DATA.....	32
BAB IV: HASIL PENELITIAN.....	35
A. DESKRIPSI VARIABEL PENELITIAN.....	35
B. UJI <i>LOCATION QUOTIENT</i>	54

BAB V: PEMBAHASAN.....	63
A. KONTRIBUSI SEKTOR-SEKTOR LAPANGAN USAHA YANG MENJADI SEKTOR BASIS DAN NON BASIS DALAM PEREKONOMIAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG.....	63
B. KONTRIBUSI SEKTOR-SEKTOR LAPANGAN USAHA YANG MENJADI SEKTOR BASIS DAN NON BASIS DALAM PEREKONOMIAN DI KABUPATEN TRENGGALEK.....	65
C. KONTRIBUSI SEKTOR-SEKTOR LAPANGAN USAHA YANG MENJADI SEKTOR BASIS DAN NON BASIS DALAM PEREKONOMIAN DI KABUPATEN KEDIRI.....	66
D. KONTRIBUSI SEKTOR-SEKTOR LAPANGAN USAHA YANG MENJADI SEKTOR BASIS DAN NON BASIS DALAM PEREKONOMIAN DI KABUPATEN NGANJUK.....	67
E. KONTRIBUSI SEKTOR-SEKTOR LAPANGAN USAHA YANG MENJADI SEKTOR BASIS DAN NON BASIS DALAM PEREKONOMIAN DI KABUPATEN BLITAR.....	68
BAB VI: PENUTUP.....	71
A. KESIMPULAN.....	71
B. SARAN.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan ekonomi nasional baik ditinjau dari aspek mikro maupun makro ekonomi sangat ditentukan oleh dinamika yang terjadi pada aktivitas perekonomian di tingkat regional. Aspek mikro ekonomi berkaitan dengan perilaku pelaku ekonomi secara individual, sedangkan aspek makro ekonomi berkaitan dengan perilaku pelaku ekonomi secara *aggregate* yaitu nasional misalnya pengangguran, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pendapatan nasional, neraca pembayaran dan lain sebagainya. Stabilitas aspek makro ekonomi ini dapat terwujud manakala didorong oleh aspek mikro ekonomi yaitu sektor-sektor lapangan usaha.

Pertumbuhan sektor-sektor lapangan usaha ini sekaligus menjadi tujuan terwujudnya stabilitas perekonomian regional, oleh karenanya setiap pemerintah kabupaten/kota pada suatu kawasan atau *region* mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain pemerintah (baik pusat maupun daerah) melalui Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan konkordansi klasifikasi tabel input-output Indonesia 2010 yang berisi tujuh belas lapangan usaha prioritas yang berpotensi untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sebagaimana disampaikan Todaro dan Smith, bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin baik kegiatan ekonomi diperoleh

dari laju pertumbuhan *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) atas dasar harga konstan¹.

Ke-tujuh belas lapangan usaha tersebut yaitu: (1) pertanian, kehutanan dan perikanan; (2) pertambangan dan penggalan; (3) industri pengolahan; (4) pengadaan listrik dan gas; (5) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; (6) konstruksi; (7) perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; (8) transportasi dan pergudangan; (9) penyediaan akomodasi dan makan minum; (10) informasi dan komunikasi; (11) jasa keuangan dan asuransi; (12) *real estate*; (13) jasa perusahaan; (14) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; (15) jasa pendidikan; (16) jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta (17) jasa lainnya. Dari tujuh belas lapangan usaha ini kemudian diturunkan menjadi sub-lapangan usaha.

Keterkaitannya dengan penelitian ini dan jika diimplementasikan pada pemerintah daerah sebagai interpretasi pemerintah pusat, idealnya perencanaan pembangunan harus berbasis pada tujuh belas lapangan usaha sebagaimana dikemukakan oleh Sanudin, *et al* bahwa PDRB sektor pertanian menyumbang 0,38% terhadap perekonomian daerah Provinsi Lampung. Komponen pertumbuhan nasional sektor kehutanan di Propinsi Lampung memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan nasional. Komponen campuran industri sektor kehutanan di Propinsi Lampung lebih lambat dari rata-rata nasional. Komponen *share* lokal memiliki nilai positif yang berarti sektor kehutanan di Propinsi Lampung kompetitif². Demikian halnya dengan studi Pramita, bahwa sektor pertanian kehutanan dan perikanan merupakan sektor basis di Kabupaten Lampung Tengah. Subsektor peternakan menjadi subsektor kunci atau pemimpin (*leading sektor*) pertanian, kehutanan dan perikanan karena daya penyebarannya tinggi serta pertumbuhan yang cepat dan progresif³.

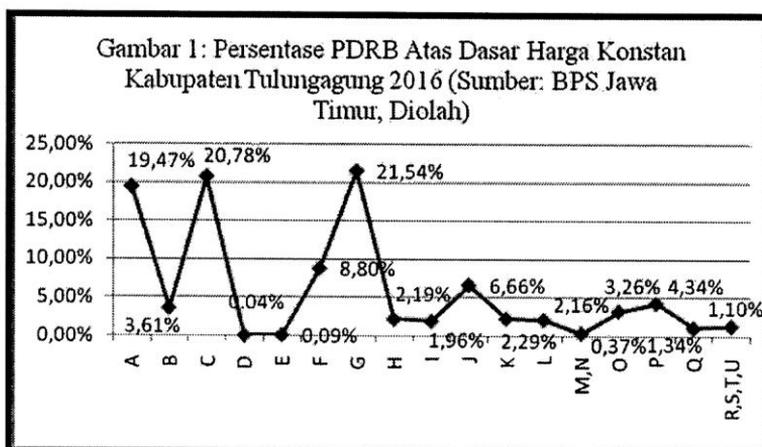
¹ Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi*, Edisi Ke Sembilan, Jakarta: Erlangga, 2008.

² Sanudin, San Afri Awang, Ronggo Sadono, dan Ris Hadi Purwanto, Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Perekonomian Wilayah: Kasus Provinsi Lampung, *Jurnal Bumi Lestari*, Volume 15 No. 1, Pebruari 2015, hlm. 10 .

³ Maria Pramita, Peranan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Dalam Perekonomian Wilayah Kabupaten Lampung Tengah, *Tesis*, Bandar Lampung: PPS Magister Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung, 2007.

Kajian terhadap tujuh belas lapangan usaha ini sangat penting dilakukan mengingat kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah sebagai bagian dari pemerintah pusat yang diproyeksi oleh PDRB sangat meyakinkan khususnya di wilayah Kediri Raya yaitu Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Nganjuk dan Blitar. Hal tersebut dinyatakan oleh Raharto bahwa untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah melambatnya perekonomian global, diperlukan sinergi antar pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi masing-masing daerah. Oleh karena itu, keunggulan komparatif yang dimiliki Kota dan Kabupaten Kediri diharapkan dapat saling melengkapi⁴.

Gambar di bawah ini menunjukkan persentase PDRB yang merupakan kontribusi masing-masing lapangan usaha dengan mengambil kasus di Kabupaten Tulungagung.

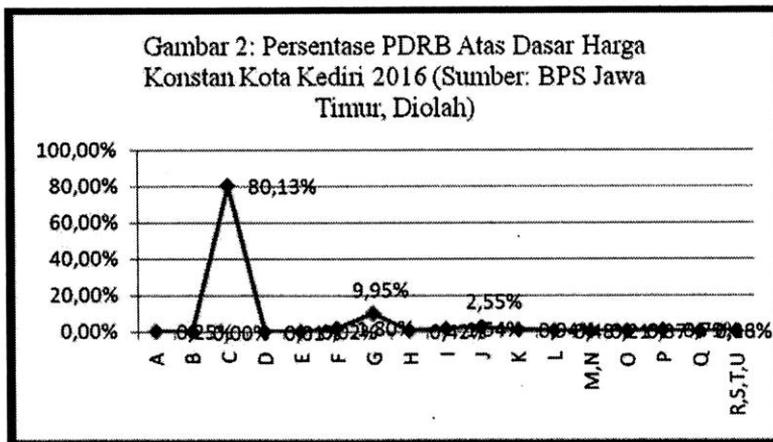


Berdasar gambar 1 dapat dikemukakan bahwa tiga lapangan usaha yang teratas kontribusinya dalam menghasilkan PDRB di Kabupaten Tulungagung yaitu: (1) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (21,54%) terdiri dari Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya serta Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor; (2) Industri Pengolahan (20,78%) terdiri dari industri makanan dan minuman, pengolahan

⁴ Anonymous, Dorong Pertumbuhan Ekonomi, BI Kediri Gelar Forum Ekonomi dan Bisnis 2016, <https://www.bangsaonline.com/berita/21070/dorong-pertumbuhan-ekonomi-bi-kediri-gelar-forum-ekonomi-dan-bisnis-2016>, Akses 30 Maret 2017.

tembakau, tekstil dan pakaian jadi, industry kulit barang dari kulit dan alas kaki, kayu barang dari kayu gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya dan lain-lain serta (3) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (19,47%).

Untuk perbandingan gambar 2 berikut ini menunjukkan bahwa tiga lapangan usaha yang teratas kontribusinya dalam menghasilkan PDRB di Kota Kediri yaitu: (1) industri pengolahan (80,13%); (2) perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (9,95%) serta (3) informasi dan komunikasi (2,55%).



Berdasar hasil pengamatan pendahuluan yaitu di Kabupaten Tulungagung dan Kota Kediri terkait persentase PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2016 dapat dijelaskan, bahwa terdapat perbedaan kekuatan persentase PDRB jika didasarkan pada lapangan usaha. Dimana untuk Kabupaten Tulungagung sumbangan terbesar pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Kota Kediri sumbangan terbesar pada lapangan usaha industri pengolahan.

Berdasar pemikiran singkat di atas perlu dilakukan penelitian yang serius untuk memberikan gambaran obyektif kepada pemerintah daerah di wilayah Kediri Raya dalam pengambilan keputusan pembangunan. Keputusan yang diambil seyogyanya perlu mempertimbangkan skala prioritas yang dapat dilihat berdasar rekomendasi penelitian ini. Sehingga judul penelitian yang dipilih dan memiliki dampak terhadap pembangunan di kawasan ini yaitu: "ANALISIS EKONOMI REGIONAL BERDASAR MODEL

LOCATION QUOTIENT DAN SHIFT SHARE DALAM PENENTUAN LAPANGAN USAHA UNGGULAN DI KEDIRI RAYA”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasar persentase *sharing* PDRB di atas terdapat beberapa pertanyaan yang tidak saja terbatas pada Kabupaten Tulungagung Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, Kabupaten Trenggalek serta Kabupaten Blitar atas dasar harga konstan menggunakan tahun pengamatan mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 yang disusun dalam bentuk rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kontribusi sektor-sektor lapangan usaha yang menjadi sektor basis dan non basis dalam perekonomian di Kabupaten Tulungagung?;
2. Bagaimana kontribusi sektor-sektor lapangan usaha yang menjadi sektor basis dan non basis dalam perekonomian di Kabupaten Trenggalek?;
3. Bagaimana kontribusi sektor-sektor lapangan usaha yang menjadi sektor basis dan non basis dalam perekonomian di Kabupaten Kediri?;
4. Bagaimana kontribusi sektor-sektor lapangan usaha yang menjadi sektor basis dan non basis dalam perekonomian di Kabupaten Nganjuk?;
5. Bagaimana kontribusi sektor-sektor lapangan usaha yang menjadi sektor basis dan non basis dalam perekonomian di Kabupaten Blitar?;

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Menjelaskan kontribusi sektor-sektor lapangan usaha yang menjadi sektor basis dan non basis dalam perekonomian di Kabupaten Tulungagung;
2. Menjelaskan kontribusi sektor-sektor lapangan usaha yang menjadi sektor basis dan non basis dalam perekonomian di Kabupaten Trenggalek;
3. Menjelaskan kontribusi sektor-sektor lapangan usaha yang menjadi sektor basis dan non basis dalam perekonomian di Kabupaten Kediri;

4. Menjelaskan kontribusi sektor-sektor lapangan usaha yang menjadi sektor basis dan non basis dalam perekonomian di Kabupaten Nganjuk;
5. Menjelaskan kontribusi sektor-sektor lapangan usaha yang menjadi sektor basis dan non basis dalam perekonomian di Kabupaten Blitar..

D. KONTRIBUSI AKADEMIK

Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat⁵. Selanjutnya disebutkan bahwa secara eksplisit tugas utama dosen yaitu mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk merespon amanat undang-undang tersebut maka penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi sebagai berikut:

1. Kontribusi secara teoritis. Keunggulan komparatif dan kompetitif pada umumnya dikaitkan dengan komoditas pertanian, sedangkan penelitian ini terkait sektor-sektor ekonomi menurut lapangan usaha yang bersifat lebih komprehensif (umum). Berdasar pemikiran tersebut, maka penelitian ini menawarkan konsep yang berbeda dimana keunggulan komparatif dan kompetitif ditinjau dari perspektif lapangan usaha.
2. Kontribusi secara praktis, yaitu: (1) Bagi Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk membuat rencana pembangunan berdasar skala prioritas yaitu lapangan usaha yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif; (2) Bagi Investor. Pemerintah daerah di Kediri Raya saat ini terbuka terhadap masyarakat (investor) yang ingin melakukan investasi di wilayahnya. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi investor sebelum membuat keputusan investasi, mengingat lapangan usaha yang menjadi prioritas pemerintah daerah merupakan sektor unggulan yang memiliki prospek ekonomi serta (3) Bagi Peneliti Selanjutnya. Hasil penelitian ini dapat menjadi cakrawala bagi

⁵ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 1 Ayat (9)*, Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI

peneliti selanjutnya untuk melakukan perluasan kajian baik dari segi data *time series*, lokasi *cross sectional*, maupun variabel penelitiannya yang diperluas tidak hanya variabel keunggulan komparatif dan kompetitif.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Hakekat Ekonomi Regional

Ekonomi regional merupakan suatu ilmu dari bidang ekonomi yang menjelaskan tentang unsur perbedaan potensi sumber daya yang dimiliki satu wilayah dengan wilayah yang lain⁶. Ilmu ekonomi regional hadir untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan pertanyaan *di mana* yang menyatakan tempat atau lokasi dan selalu dikesampingkan dalam analisis cabang ilmu ekonomi lain. Fokus dalam ekonomi regional untuk memastikan suatu rencana kegiatan tepat dilakukan di wilayah tertentu. Kebijakan ekonomi regional pada umumnya memiliki tujuan yang memfokuskan kepada aspek *full employment*, *economic growth*, dan *price stability*⁷. Terciptanya *full employment* dapat mengurangi tingkat pengangguran yang menjadi masalah nasional maupun daerah secara turun-temurun. *Economic growth* diharapkan dapat mendorong munculnya lapangan kerja baru untuk para angkatan kerja yang selalu bertambah setiap tahunnya. Tujuan terakhir adalah *price stability* (kestabilan harga) yang dapat mendorong rasa aman dan kestabilan ekonomi masyarakat secara umum.

⁶Robinson Tarigan. *Ekonomi Regional- Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm.21.

⁷*Ibid*, hlm.23.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dariseluruh sektor perekonomian disuatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Pemahaman nilai tambah bruto adalah nilai produksi (*output*) dikurangi dengan Biayaantara (*intermediate cost*). Komponen-komponen nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung netto. Jadi dengan menghitung nilai tambah bruto dari dari masing-masing sektor dan kemudian menjumlahkannya akan menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk domestik regional bruto dapat digunakan sebagai indikator yang untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui berbagai instrument ekonomi yang didalamnya terlihat dengan jelas kondisi makro suatu daerah dengan pertumbuhan ekonominya, pendapatan per kapita, dan instrument lainnya⁸.

PDRB merupakan nilai bersih atas barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat diwilayah tertentu selama setahun tanpa memperhatikan pemilik kegiatan tersebut. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh darikenaikan PDRB atas dasar harga konstan yang mencerminkan kenaikanproduksi barang dan jasa dari tahun ke tahun. PDRB menurut badan pusat statistik merupakan jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah domestik⁹. PDRB merupakan indikator dalam mengukur pertumbuhan ekonomi daerah tertentu dalam periode waktu tertentu (umumnya setahun) yang dihasilkan oleh kegiatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi atas dasar harga berlaku dan harga konstan¹⁰.

Produk domestik bruto adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam suatu tahun tertentu dengan menggunakan faktor-faktor produksi milik warga Negeranya dan milik penduduk di negara-negara lain. Biasanya dinilai menurut

⁸Imamul Arifin & Gina Hadi W. *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Bandung: Grafindo, 2009), hlm. 11.

⁹Badan Pusat Statistik. *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha*, (Sumatera Selatan: BPS, 2015), hlm.1.

¹⁰Bank Indonesia. *Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Sumatera Selatan*, Vol. 14, No 2, 2014, hlm. 134.

harga pasar dan dapat didasarkan kepada harga yang berlaku dan harga tetap¹¹.

Menurut Badan Pusat Statistik, PDRB dapat dihitung menggunakan tiga konsep pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan¹². *Pertama pendekatan produksi*. Pendekatan Produksi; Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). *Kedua pendekatan pengeluaran*. Produk Domestik Regional Bruto adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga, pemerintah, modal tetap domestik bruto, dan inventori. *Ketiga pendekatan pendapatan*. Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

3. Pertumbuhan Ekonomi

a. Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan perekonomian dalam lingkup barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan dalam jangka pandang kesejahteraan ekonomi masyarakat meningkat¹³. Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari waktu ke waktu¹⁴. Pertumbuhan ekonomi juga diartikan sebagai bentuk kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan berbagai bentuk barang dan jasa kepada penduduknya¹⁵. Pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi klasik seperti Schumpeter dipandang sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi kapitalistik. Sedangkan pandangan ekonomi modern lainnya seperti Harrod-Domar memandang pertumbuhan ekonomi sebagai upaya pembentukan investasi bagi pertumbuhan

¹¹ Sadono Sukirno. *Pengantar Ekonomi Makro*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 61.

¹² Asfia Murni. *Ekonomi Makro*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 169.

¹³ Joko Untoro. *Ekonomi*, (Jakarta: Kawahmedia, 2010), hlm. 39.

¹⁴ Sadono Sukirno. *Pengantar Ekonomi Makro.....*, hlm. 75.

¹⁵ Giana Hadi. *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Jakarta: PT. Setia Purna, 2009), hlm. 11.

ekonomi. Semakin tinggi investasi maka akan semakin baik perekonomian, investasi tidak hanya memiliki pengaruh terhadap permintaan agregat tetapi juga terhadap penawaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi¹⁶. Dalam perspektif yang lebih panjang investasi akan menambah stok kapital. Pertumbuhan ekonomi menjadi upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai peningkatan output yang dapat diukur menggunakan produk domestik bruto maupun produk domestik regional bruto dalam suatu wilayah¹⁷.

Pertumbuhan ekonomi merupakan unsur penting dalam proses pembangunan wilayah yang masih merupakan target utama dalam rencana pembangunan disamping pembangunan sosial. Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatannasional riil. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan jika tingkat kegiatan ekonominya meningkat atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui indikator akan diukur melalui indikator perkembangan PDB atau PNB dari tahun. Pengukuran pertumbuhan ekonomi secara konvensional biasanya dengan menghitung peningkatan presentase dari Produk Domestik Bruto (PDB). PDB dapat mengukur pengeluaran total dari suatu perekonomian terhadap berbagai barang dan jasa yang baru diproduksi pada suatu saat atau tahun serta pendapatan total yang diterima dari adanya seluruh produksi barang dan jasa tersebut atau secara lebih rinci¹⁸. Para ekonom klasik mempelajari gejala pertumbuhan ekonomi yang memperlihatkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Beberapa faktor dalam teori ekonomi mikro ini diperkenalkan dalam persamaan berikut¹⁹.

¹⁶ Ahmad Ma'aruf dan Latri Wihastuti. *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya*, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 9, No. 1, 2008, hlm. 44-45.

¹⁷ Rahardjo Adisasmita. *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah, Cetakan Pertama*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 4.

¹⁸ Gregory Mankiw, N. *Makro Ekonomi Edisi Keenam*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 9.

¹⁹ Prathama Rahardja, Mandala Manurung, 2008, *Teori Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2008), hlm. 136.

$$Q = f (K,L)$$

dimana:

Q = output

K = barang modal

L = tenaga kerja

Beberapa faktor dalam teori ekonomi makro ini diperkenalkan dalam persamaan berikut²⁰.

$$Q = f (K,L,T,U)$$

dimana:

Q = output

K = barang modal

L = tenaga kerja

T = teknologi

U = uang

4. Pertumbuhan Ekonomi Regional

Pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*) juga merupakan perubahan nilai kegiatan ekonomi dari tahun ke tahun untuk satu periode ke periode yang lain dengan mengambil rata-ratanya dalam waktu yang sama, maka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi harus dibandingkan dengan tingkat pendapatan nasional dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi regional semakin meningkatkan otonomi daerah. Melalui otonomi daerah ini masing-masing wilayah akan berlomba dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk kemakmuran masyarakat²¹. Pandangan beberapa ekonom dunia terkait pertumbuhan ekonomi regional seperti Harold-Domar, Neoklasik, Solow, dan Romer menyatakan bahwa terdapat tiga faktor atau komponen utama dari setiap bangsa, yaitu akumulasi Modal, semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia, pertumbuhan

²⁰ *Ibid.*

²¹ Sjafrizal. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi Cetakan Pertama*, (Padang: Baduose Media, 2008), hlm. 86.

penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya dengan sendirinya membawa pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi²².

Berkaitan dengan faktor tersebut, sebuah penelitian menggambarkan bahwa pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tujuan penting yaitu mencapai pertumbuhan (*growth*), pemerataan (*equity*), dan keberlanjutan (*sustainability*)²³. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi regional dapat digunakan penggunaan menggunakan produk domestik regional bruto (PDRB). PDRB menunjukkan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh sistem perekonomian di wilayah atau daerah tertentu dalam waktu tertentu, biasanya dihitung dalam tahunan. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang bersifat multidimensional yang melibatkan perubahan besar pada struktur ekonomi, sosial, permasalahan masyarakat (kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran) dalam konteks pertumbuhan ekonomi²⁴.

Pembangunan regional merupakan fungsi dari sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, prasarana dan sarana, transportasi dan jaringan komunikasi, elemen industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, dan lingkungan pembangunan secara luas.²⁵ Pandangan Kuznets mendefinisikan "pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya"²⁶.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dinilai tiga aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi regional. Aspek pertama pertumbuhan ekonomi regional dilihat dari meningkatnya secara terus menerus persediaan barang. Aspek kedua pertumbuhan ekonomi regional

²² Michael P Todaro & Stephen C Smith. *Economic Development. Eleventh Edition*, (United States: Addison Wesley, 2011), hlm. 92.

²³ Fitrah Afrizal. *Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah dan Tenaga Kerja Terhadap Terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2011*, Makasar, hlm. 12.

²⁴ Sirojuzilam. *Disparitas Ekonomi dan Perencanaan Regional, Ketimpangan Ekonomi Wilayah Barat dan Wilayah Timur Provinsi Sumatera Utara*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hlm. 16.

²⁵ Rahardjo Adisasmita. *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi,....*, hlm. 13.

²⁶ M.L. Jhingan. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Edisi 1*, cetakan ke tujuh, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 53.

berkaitan dengan kemajuan teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk. Aspek terakhir yaitu penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian dibidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat.

Pertumbuhan ekonomi regional merupakan pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut. Adapun macam-macam teori pertumbuhan wilayah adalah sebagai berikut.²⁷

1) Teori Ekonomi Klasik.

Sistem ekonomi pasar bebas akan menciptakan efisiensi, membawa ekonomi dalam kondisi full employment, dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi stationer (*stationary state*). Teori ini membahas tentang kebebasan seluas luasnya dalam menentukan kegiatan ekonomi yang dirasa paling baik dilakukan.

2) Teori Harrod-Domar.

Dalam sistem regional, faktor-faktor produksi atau hasil produksi yang berlebihan dapat diekspor dan yang kurang dapat diimpor. Impor dan tabungan adalah kebocoran-kebocoran dalam menyedot output daerah. Sedangkan ekspor dan investasi dapat membantudalam menyedot output kapasitas penuh dari faktor-faktor produksi yang ada di daerah tersebut. Kelebihan tabungan yang tidak terinvestasikan secara lokal dapat disalurkan ke daerah-daerah lain yang tercemin dalam surplus ekspor. Apabila pertumbuhan tenaga kerja melebihi dari apa yang diserap oleh kesempatan kerja lokal maka migrasi neto dapat menyeimbangkannya.

3) Teori Pertumbuhan Neo-Klasik.

Teori Solow-Swan menyatakan bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan sehingga pemerintah tidak perlu terlalu mencampuri pasar. Campur tangan pemerintah hanya sebatas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

²⁷ Robinson Tarigan. *Ekonomi Regional- Teori.....*, hlm. 47.

Suatu daerah akan mengimpor modal jika tingkat pertumbuhan modalnya lebih kecil dari rasio tabungan domestik terhadap modal. Dalam pasar sempurna marginal productivity of labour (MPL) adalah fungsi langsung tapi bersifat terbalik dari marginal productivity of capital (MPK). Kondisi ini dapat dilihat dari nilai rasio modal tenaga kerja.

4) Teori Jalur Tepat.

Setiap wilayah perlu melihat sektor atau komoditi apa yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan secara cepat, baik karena potensi alam maupun sektor potensi itu memiliki *competitive advantage* untuk dikembangkan.

5. Indikator Pertumbuhan Ekonomi Regional

Indikator dalam pertumbuhan ekonomi regional di lihat dalam beberapa aspek penting diantaranya ketidakseimbangan pendapatan, perubahan struktur perekonomian, pertumbuhan kesempatan kerja, tingkat penyebaran kemudahan dan produk domestik regional bruto (PDRB).²⁸

1) Ketidakseimbangan Pendapatan.

Salah satu ukuran penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah adalah ada atau tidaknya kesenjangan pendapatan. Selain itu, pengukuran ketidakseimbangan pendapatan dapat diterapkan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah.

2) Perubahan Struktur Perekonomian.

Dalam kawasan Negara maju, pembangunan ekonomi yang dilaksanakan akan mengakibatkan perubahan struktur perekonomian, dimana terjadi kecendrungan bahwa kontribusi (peran) sektor pertanian terhadap nilai PDRB akan menurun, sedangkan kontribusi sektor industri akan meningkat. Salah satu sektor penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah adalah sektor riil utamanya dalam menyerap tenaga kerja penuh.

3) Pertumbuhan Kesempatan Kerja.

Salah satu permasalahan nasional Indonesia adalah angka tingkat pengangguran yang tinggi diakibatkan kesempatan kerja yang rendah. Kondisi ini mendorong munculnya krisis ekonomi karena

²⁸ Raharjo Adisasmita. *Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 91.

sektor riil menjadi tidak sehat utamanya didorong kemampuan daya beli masyarakat yang turun.

4) Tingkat Penyebaran Kemudahan.

Kemudahan yang dimaksud adalah segala akses, sarana, produk dan lain-lain yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat luas, seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, maupun kebutuhan penunjang lain seperti sumber listrik, bahan baku, air bersih, dan penyedia jasa keuangan, angkutan, serta perbankan.

5) Produk Domestik Regional Bruto.

Ukuran penting dalam pertumbuhan ekonomi wilayah (*regional*) adalah produk domestik regional bruto. Indikator ini mampu menunjukkan seberapa banyak barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat di wilayah tertentu dan dalam waktu perhitungan tertentu. Peningkatan PDRB mendorong peningkatan sektor riil dan meningkatkan jumlah lapangan kerja baru untuk menurunkan tingkat pengangguran.

Teori pertumbuhan ekonomi wilayah lebih mengacu pada sektor regional ada dua yaitu teori basis ekspor Richardson dan model pertumbuhan interregional.²⁹

1) Teori ini murni dikembangkan dalam kerangka ekonomi regional, teori ini membagi kegiatan produksi atau jenis pekerjaan yang terdapat didalam suatu wilayah atas pekerjaan basis (dasar) dan pekerjaan servis (pelayanan), untuk menghindari kesalahpahaman disebut saja sektor non-basis. Sektor non basis adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri. Jadi pertumbuhan bergantung pada kondisi perekonomian wilayah secara keseluruhan dan dapat dilihat dari sisi produksi dan sisi pengeluaran.

2) Model pertumbuhan interregional, Model ini adalah perluasan dari teori basis ekspor yaitu dengan menambah faktor-faktor yang bersifat eksogen, dan daerah yang bersangkutan membahas daerahnya sendiri tanpa membahas dampak daerahlain. Dalam analisisnya memasukkan dampak dari daerah tetangga. Itulah sebabnya maka dinamakan model interregional. Diasumsikan bahwa selain ekspor, pengeluaran pemerintah dan investasi juga bersifat eksogendan daerah yang bersangkutan terikat pada

²⁹ Robinson Tarigan. *Ekonomi Regional- Teori dan Aplikasi*,.....hlm. 53.

suatu sistem yang terdiri dari beberapa daerah yang berhubungan erat.

6. Teori Keunggulan Komparatif

Keunggulan komparatif merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk mengukur daya saing suatu wilayah. Keunggulan komparatif menjadi suatu kegiatan ekonomi yang menurut perbandingan lebih menguntungkan bagi pengembangan daerah. Hukum keunggulan komparatif (*law of comparative advantage*) menyatakan bahwa perdagangan dapat dilakukan oleh negara yang tidak memiliki keunggulan absolut pada kedua komoditi yang diperdagangkan dengan melakukan spesialisasi produk yang kerugian absolutnya lebih kecil atau memiliki keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif tersebut dibedakan atas *cost comparative advantage/labor efficiency* dan *production comparative advantage/labor productivity*. Penggunaan istilah keunggulan komparatif pada awalnya dikemukakan oleh David Ricardo (1917) dalam membahas kegiatan perdagangan antara dua negara³⁰.

Menurut *teori cost comparative advantage/labor efficiency*, suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang di mana negara tersebut dapat memproduksi lebih efisien serta mengimpor barang di mana negara tersebut memproduksi relatif kurang atau tidak efisien. Sementara itu, pada *production comparative advantage/labor productivity* dapat dikatakan bahwa suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang di mana negara tersebut memproduksi lebih produktif serta mengimpor barang di mana negara tersebut memproduksi relatif kurang atau tidak produktif.

Dalam konsep keunggulan komparatif menurut David Ricardo digambarkan bahwa jika ada dua negara yang saling melakukan kerjasama ekspor dan produk yang di ekspor tersebut memiliki keunggulan komparatif maka ke dua negara ada mendapatkan keuntungan. Teori keunggulan komparatif menjadi pelengkap kelemahan teori keunggulan absolut yang disampaikan Adam Smith. Sedangkan dalam pemahaman keunggulan komparatif dapat dikemukakan bahwa suatu Negara akan menspesialisasi dalam

³⁰ *Ibid*,....hlm. 79.

memproduksi barang yang lebih efisien di mana negara tersebut memiliki keunggulan komparatif³¹.

Dalam pandangan teori klasik dijelaskan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi dengan adanya perbedaan dalam faktor produksi (*productivity of labor*) antara negara.³²

7. Teori Keunggulan Kompetitif

Secara umum, setiap perusahaan memiliki keinginan untuk lebih unggul di bandingkan perusahaan lain dalam sebuah persaingan bisnis. Dalam mewujudkan keinginan tersebut, perusahaan akan melakukan strategi bersaing yang eksplisit melalui kegiatan-kegiatan dari berbagai departemen fungsional perusahaan yang ada. Konsep keinginan ini dalam pandangan bisnis memberikan istilah keunggulan kompetitif (*competitive advantage*). Definisi umum keunggulan kompetitif menekankan pada keunggulan atau superior dalam hal sumber daya dan keahlian yang dimiliki perusahaan.

Perusahaan yang memiliki kompetensi dalam bidang pemasaran, manufakturing, dan inovasi dapat menjadikannya sebagai sumber-sumber untuk mencapai keunggulan bersaing. Hal ini sejalan dengan pandangan David Hunger dan Thomas Wheelen bahwa keunggulan kompetitif adalah kumpulan strategi untuk menentukan keunggulan suatu perusahaan dari persaingan diantara perusahaan lain. Pandangan berikutnya menyakini bahwa kunci sukses dalam keunggulan bersaing didorong oleh penciptaan nilai dan kepuasan para konsumen melalui penyampaian produk dan jasa dengan harga yang bersaing³³.

Strategi bersaing meliputi biaya rendah (*low cost*) dan diferensiasi. Selanjutnya dikombinasikan kedua strategi tersebut disebut fokus³⁴. Keunggulan kompetitif dapat tercapai apabila perusahaan menerapkan strategi penciptaan nilai yang tidak dimiliki

³¹ Boediono. *Ekonomi Moneter Edisi 3*, (Yogyakarta: BPFE, 2008), hlm. 48.

³² Dominick Salvatore. *Mikroekonomi Edisi Keempat*, (New York: McGraw-Hill Inc, 2006), hlm. 187.

³³ Fandy Tjiptono. *Strategi Pemasaran, Edisi ketiga*, (Yogyakarta: ANDI, 2008), hlm. 225.

³⁴ David Hunger, J & Thomas L. Wheelen. *Strategic Management and. Business Policy Achieving Sustainability. Twelfth Edition*, (Pearson Prentice Hall, 2010), hlm.245.

oleh perusahaan lain pada waktu yang bersamaan³⁵. Keunggulan bersaing diharapkan mampu untuk mencapai laba sesuai rencana, meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta melanjutkan kelangsungan hidup suatu usaha³⁶.

Berkaitan dengan keunggulan kompetitif, suatu perusahaan memiliki beberapa tujuan dalam pelaksanaan strategi keunggulan ini yaitu membentuk posisi yang tepat, mempertahankan loyalitas pelanggan, mendapatkan pangsa pasar baru, memaksimalkan penjualan, menciptakan kinerja bisnis yang efektif³⁷. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur keunggulan kompetitif melalui aspek keunikan, jarang dijumpai, tidak mudah ditiru, dan harga bersaing. Keunikan produk adalah keunikan produk perusahaan yang memadukan nilai seni dengan selera pelanggan. Harga bersaing adalah kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan harga produknya dengan harga umum di pasaran. Tidak mudah dijumpai berarti keberadaannya langka dalam persaingan yang saat ini dilakukan. Tidak mudah ditiru berarti tidak dapat ditiru dengan sempurna.

8. Ekonomi Pembangunan

Secara umum pembangunan ekonomi dalam suatu negara harus menjawab tiga permasalahan besar di negara manapun yaitu kemiskinan, tingkat pengangguran, dan ketimpangan pendapatan. Sehingga pembangunan menjadi mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan pendapatan dan memberantas kemiskinan sebagai harapan terwujudnya kondisi kehidupan yang lebih baik secara material maupun spiritual³⁸. Ekonomi pembangunan juga dipandang sebagai suatu cabang ilmu ekonomi yang menganalisa masalah-masalah yang dihadapi oleh negara sedang berkembang dan mencari cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah itu agar negara-negara tersebut dapat membangun ekonominya lebih cepat lagi³⁹.

³⁵ J.B. Barney. *Gaining and Sustaining Competitive Advantage, Fourth. Edition*, (Wesley: Addison, 2010), hlm.9.

³⁶ L Saiman. *Kewirausahaan: Teori, Praktik, dan Kasus-Kasus, edisi kedua*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 128.

³⁷ Philip Kotler & Gary Armstrong. *Prinsip-prinsip Pemasaran. Edisi. 13. Jilid 1*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 230.

³⁸ Michael P Todaro & Stephen C Smith. *Economic Development,.....* hlm.21.

³⁹ Subandi. *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Alfabeta, 2012), hlm. 99.

Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat menyebabkan perubahan-perubahan, terutama terjadi perubahan menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk dan perubahan dari struktur ekonomi, baik peranannya terhadap pembentukan pendapatan nasional, maupun peranannya dalam penyediaan lapangan kerja⁴⁰.

Tujuan utama dari setiap pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dengan partisipasi masyarakat, dengan dukungan sumber daya yang ada harus mampu menghitung potensi sumber daya-sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun ekonomi daerahnya⁴¹.

Salah satu teori yang mendasar pembangunan ekonomi adalah teori ketimpangan yang menjelaskan bahwa terjadinya kegagalan dalam pembangunan karena munculnya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Kondisi ini mengakibatkan perbedaan kemampuan suatu daerah dalam mendorong suatu proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ada penyebutan wilayah maju (*developed region*) dan wilayah terbelakang (*underdeveloped region*)⁴².

Fenomena tersebut menjadi gambaran adanya ketidakmerataan pembangunan yang merupakan hasil proses investasi yang bermula pada suatu sektor atau wilayah dengan demikian sektor atau wilayah yang bersangkutan tentulah akan tumbuh lebih baik dibandingkan dengan sektor atau wilayah yang lain⁴³. Dalam pembangunan ekonomi negara setidaknya mengikuti pola pertumbuhan ekonomi yang menjadi beberapa tahapan yaitu masyarakat tradisional,

⁴⁰ Akhmad Mahyudi. *Ekonomi Pembangunan dan Analisis Data Empiris*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 1.

⁴¹ Subandi. *Ekonomi Pembangunan....*, hlm.133-134.

⁴² Sjafrizal. *Ekonomi Pembangunan.....*, hlm.104.

⁴³ Nanuk Dwi Retnandari. *Pengantar Ekonomi dalam Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 158.

prasyarat untuk lepas landas, lepas landas, gerakan kearah kedewasaan, masa konsumsi tinggi⁴⁴.

Pembangunan ekonomi tidak hanya usaha negara-negara yang relatif belum berkembang, tetapi juga merupakan usaha-usaha negara yang relatif berkembang. Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan rill per kapita. Jadi, pembangunan ekonomi disamping untuk menaikkan pendapatan nasional rill juga untuk meningkatkan produktivitas. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tingkat *output* tertentu dapat ditentukan oleh tersedianya sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia, tingkat teknologi, keadaan pasar dan kerangka kehidupan ekonomi serta output itu sendiri⁴⁵.

Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan secara seimbang perencanaan yang teliti mengenai penggunaan sumberdaya-sumberdaya yang ada. Melalui perencanaan pembangunan ekonomi daerah, suatu daerah dapat dilihat secara keseluruhan sebagai suatu unit ekonomi yang didalamnya terdapat berbagai unsur yang berinteraksi satu dengan yang lain. Beberapa teori pembangunan daerah antara lain⁴⁶:

1. Teori Ekonomi Neo Klasik.

Teori ini memberikan dua konsep pokok dalam pembangunan daerah yaitu keseimbangan dan mobilitas faktor-faktor produksi. Artinya sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiah jika modalnya bisa mengalir tanpa restriksi atau pembatasan. Biasanya modal akan mengalir dari daerah yang mempunyai upah yang tinggi ke daerah dengan upah yang rendah.

2. Teori Basis Ekonomi.

Teori ini menyatakan bahwa faktor utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal dengan orientasi ekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan menciptakan peluang kerja.

⁴⁴ Rahardjo Adisasmita. *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi.....*, hlm. 23.

⁴⁵ Irawan & M. Suparmoko. *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: BPFE, 2011), hlm. 4-5.

⁴⁶ Lincoln Arsyad. *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), hlm. 116.

3. Teori Lokasi.

Lokasi merupakan suatu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini sesuai jika dikaitkan dengan pengembangan kawasan industri. Perusahaan cenderung meminimumkan biaya dengan cara memilih lokasi yang memaksimalkan peluangnya untuk mendekati pasar dan bahan baku.

4. Teori Tempat Sentral, teori ini menganggap bahwa ada hirarki tempat. Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumberdaya.

5. Teori Kausasi Kumulatif, kondisi daerah-daerah di sekitar kota yang semakin buruk merupakan konsep dasar dari teori kausatif kumulatif. Kekuatan-kekuatan pasar cenderung memperparah kesenjangan antara daerah-daerah tersebut. Daerah yang maju akan mengalami akumulasi keunggulan kompetitif dibanding daerah-daerah yang terbelakang. Hal ini oleh *Myrdal* disebut sebagai *backwash effects*.

B. LANDASAN EMPIRIS

Landasan empiris berisi penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu memuat tujuan penelitian, metode penelitian singkat dan hasil penelitian yang nantinya bermanfaat dalam menyusun bab pembahasan.

Studi Arifien, *et al* yang tujuan utamanya membuat perencanaan untuk pengembangan sektor pertanian, khususnya tanaman pangan demi peningkatan perekonomian daerah. Langkah langkah yang diambil adalah dengan melihat kinerja sektor pertanian di kabupaten, mengidentifikasi komoditas tanaman pangan yang potensial untuk dapat dikembangkan di masing-masing kecamatan di kabupaten, menyusun hierarki pusat-pusat pelayanan sosial dan ekonomi di kabupaten dan menyusun perencanaan pengembangan sektor pertanian sub sektor tanaman pangan di kabupaten yang kemudian digambarkan dalam sebuah peta perencanaan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Wonosobo. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis *Shift Share*, *Location Quotient* (LQ), dan analisis Skalogram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas tertinggi dalam pertanian di Kabupaten Wonosobo adalah tanaman sayuran. Jenis komoditas tanaman yang dapat dikembangkan adalah

komoditas tanaman pangan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif⁴⁷.

Baransano, *et al* dalam studinya menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia terbagi kedalam sembilan sektor dan membutuhkan investasi yang sangat besar, sehingga pemerintah (terutama pemerintah daerah) perlu menetapkan sektor-sektor yang dapat diharapkan menjadi faktor pendorong bagi sektor lain agar berkembang menjadi penggerak utama pembangunan dalam mengurangi ketimpangan wilayah. Penelitian ini bertujuan mengkaji tingkat ketimpangan pembangunan antar dan di dalam wilayah di Provinsi Papua Barat tahun 2005-2013, serta bagaimana implementasi peran dari sektor unggulan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah. Hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan *Indeks Theil*, *Location Quotient* dan *Shift Share Analysis* menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan yang terjadi disebabkan oleh ketimpangan di dalam wilayah pengembangan dan dipengaruhi oleh kabupaten Teluk Wondama, Sorong, Raja Ampat dan Fak-Fak. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sektor pertanian masih memberikan pengaruh terbesar terhadap pembentukan PDRB Papua Barat selama periode 2005-2013. Kami juga menemukan dan merekomendasikan bahwa sektor-sektor unggulan di setiap kabupaten/kota merupakan salah satu strategi alternatif bagi pemerintah daerah dalam memulai suatu perencanaan pembangunan, dimana keunggulan komparatif dan kompetitif dari sektor-sektor tersebut dapat berperan sebagai “mesin pertumbuhan” dalam mengurangi ketimpangan pembangunan⁴⁸.

Amalia dalam kajiannya yang bertujuan untuk mengetahui sektor-sektor yang menjadi sektor basis dan non basis dalam perekonomian Kabupaten Bone Bolango serta perubahan dan pergeseran sektor perekonomian Kabupaten Bone Bolango. Alat analisis yang digunakan yaitu *Location Quotient* (LQ) dan *Shift Share*.

⁴⁷ Moch. Arifien, Fafurida, dan Vitradesie Noekent, Perencanaan Pembangunan Berbasis Pertanian Tanaman Pangan Dalam Upaya Penanggulangan Masalah Kemiskinan, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 13, Nomor 2, Desember 2012, hlm.288-302.

⁴⁸ Michael Albert Baransano, Eka Intan Kumala Putri, Noer Azam Achzani dan Lala Kolopaking, Peranan Sektor Unggulan sebagai Salah Satu Faktor dalam Mengurangi Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi Papua Barat, *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 27, No. 2, Agustus 2016, pp. 119-136.

Hasil analisis LQ menunjukkan ada tiga sektor basis yaitu sektor pertanian, industri pengolahan serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Berdasarkan analisis *shift share*, maka sektor yang kompetitif adalah sektor keuangan dan jasa perusahaan⁴⁹.

Studi Yurliana, *et al* yang bertujuan untuk menganalisis sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Batanghari. Alat analisis yang digunakan adalah *location quotient*, *dynamic location quotient*, *shift-share* dan indeks spesialisasi. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa sektor perekonomian di Kabupaten Batanghari dapat dikelompokkan atas empat kriteria yaitu: (1) sektor unggulan adalah sektor jasa-jasa; (2) sektor andalan adalah sektor listrik dan sektor pengangkutan; (3) sektor prospektif adalah sektor pertanian, industri, bangunan dan konstruksi serta sektor perdagangan; (4) sektor kurang prospektif adalah sektor pertambangan dan sektor keuangan⁵⁰.

Demikian halnya dengan Prishardoyo dalam penelitian yang menjelaskan bahwa pengembangan ekonomi di suatu daerah merupakan proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola dan memanfaatkan sumber daya mereka dengan memiliki kemitraan antara pemerintah daerah dan pengusaha swasta, sehingga merangsang kegiatan ekonomi atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan akan ada berbagai lapangan kerja baru. Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui Sektor ekonomi mana yang menjadi basis Kabupaten Pati, (2) peran Kabupaten Pati dan Daerah lain dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif kualitatif dan data yang dianalisis diambil dari Kabupaten Pati. Selanjutnya dalam menganalisis data berbasis model ekonomi yang menggunakan analisis (LQ), analisis pergeseran saham dan analisis gravitasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis *location quotient* sektor-sektor potensial yang dapat diandalkan selama tahun analisis 2000-2005 adalah sektor pertanian, sektor listrik, gas dan air minum, sektor bangunan, sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan. Berdasarkan hasil analisis keterkaitan wilayah (Gravitasi) selama tahun analisis 2000-2005 menunjukkan bahwa kabupaten yang paling

⁴⁹ Fitri Amalia, Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Wilayah di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 15, Nomor 1, Juni 2014, hlm. 19-26.

⁵⁰ Yurliana; M. Rachmad R .; Selamet Rachmadi, Analisis Sektor Ekonomi Unggulan di Kabupaten Batanghari, *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, Vol. 3 No. 2, Oktober-Desember 2015.

kuat interaksinya dengan Kabupaten Pati adalah Kabupaten Kudus dan yang sedikit interaksinya adalah dengan Kabupaten Jepara⁵¹.

Sedangkan Keratorop, *et al* dalam studinya bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi dan menetapkan tanaman pangan sebagai komoditas unggulan; (2) mendeskripsikan ketersediaan lahan untuk pengembangan tanaman pangan unggul; (3) mengatur arah pengembangan komoditas tanaman pangan unggul di Kabupaten Boven Digoel. Metodologi yang digunakan dalam makalah ini terdiri dari analisis *Location Quotient (LQ)*, *Defferential Shift* dalam *Shift Share Analysis (SSA)*, dan analisis ketersediaan lahan. Hasil analisis LQ dan SSA menunjukkan bahwa ubi kayu, ubi jalar, padi, jagung dan kacang merupakan komoditas unggulan komoditas pangan. Analisis ketersediaan lahan menunjukkan bahwa ada tiga skenario yang diperlukan dalam menentukan ketersediaan lahan untuk tanaman pangan yaitu skenario pertama, luas lahan yang tersedia seluas 36.227 ha, dalam skenario kedua tersedia lahan seluas 43.401 ha, sedangkan pada skenario ketiga, tersedia lahan seluas 610.990 ha⁵².

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: (1) penelitian terdahulu meneliti hanya pada satu kabupaten/kota saja sedangkan penelitian ini menggunakan setting penelitian yaitu tujuh kabupaten/kota yang ada di Kediri Raya; (2) penelitian terdahulu meneliti tentang komoditas hasil pertanian, sedangkan penelitian ini meneliti sektor-sektor ekonomi didasarkan lapangan usaha; (3) penelitian terdahulu menganalisis data yang singkat, sedangkan penelitian ini menggunakan data *time series* ketujuh kabupaten/kota lebih banyak yaitu tujuh tahun; (4) penelitian terdahulu membahas sektor-sektor ekonomi yang terbatas, sedangkan penelitian ini membahas tujuh belas sektor ekonomi berdasar lapangan usaha; (5) penelitian terdahulu menggunakan tahun dasar tahun 2000, penelitian ini menggunakan tahun dasar tahun 2010 dan (6) penelitian terdahulu hanya didasarkan pada PDRB atas dasar harga konstan,

⁵¹ Bambang Prishardoyo, Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Potensi Ekonomi terhadap Produk Domestik Regionalbruto (PDRB) Kabupaten Pati Tahun 2000-2005, *JEJAK*, Volume 1, Nomor 1, September, 2008, hlm.1.

⁵² Marianus Keratorop, Widiatmaka, Suwardi, Arahan Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua, *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan* Vol. 6 No. 2 (Desember 2016): 141-150

sedangkan penelitian ini menggunakan data PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku.

Disamping penelitian terdahulu yang relevan, penelitian ini juga didasarkan pada teori-teori yang relevan yaitu: (1) hakekat ekonomi regional; (2) hakekat pertumbuhan ekonomi regional; (3) hakekat *product domestic regional bruto*; (4) hakekat keunggulan komparatif; (5) hakekat model *location quotient*; (6) hakekat keunggulan kompetitif dan (7) hakekat model *shift share*.

C. HIPOTESIS

Berdasar bentuk rumusan masalah, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis melainkan untuk memberikan pertimbangan empiris yang didasarkan pada pengujian statistika mengenai konsep pembangunan ekonomi regional yang menjadi prioritas utama atau sektor lapangan usaha unggulan sehingga akan terwujud percepatan pembangunan ekonomi regional di wilayah Kediri Raya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. RANCANGAN PENELITIAN

Rancangan penelitian atau desain penelitian ini memuat pendekatan dan jenis penelitian. Mengingat data utama penelitian ini yaitu data kuantitatif atau data numerik PDRB kabupaten di Kediri Raya maka menurut hemat peneliti pendekatan penelitian ini yaitu kuantitatif. Menurut Sugiyono, metode kuantitatif dipilih karena data penelitian berupa angka dan analisis menggunakan statistik⁵³.

Sedangkan statistik adalah kumpulan fakta yang berbentuk angka-angka yang disusun dalam bentuk daftar atau tabel yang menggambarkan suatu persoalan⁵⁴. Definisi tersebut relevan dengan pendapat Gasperz yang menyatakan bahwa kata statistik telah dipakai untuk menyatakan kumpulan fakta, umumnya berbentuk angka yang disusun dalam tabel dan atau diagram, yang menggambarkan suatu persoalan⁵⁵. Sedangkan data penelitian ini dalam bentuk angka-angka tentang PDRB berdasar harga konstan dan harga berlaku pada kelima kabupaten di Kediri Raya yang memiliki makna ekonomi untuk menentukan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif daerah setempat.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: ALFABETA, 2014.

⁵⁴ Ating Somantri dan Sambas Ali Muhidin, *Aplikasi statistika dalam Penelitian*, Bandung: Pustaka Ceria, 2006, hlm.18.

⁵⁵ Vincent Gasperz, *Statistika*, Bandung: Armico, 1989, hlm.8.

Berdasar bentuk rumusan masalahnya, maka jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif karena menguji variabel mandiri yaitu keunggulan komparatif dan kompetitif.

B. POPULASI, SAMPEL DAN TEKNIK SAMPLING

1. **Populasi** penelitian ini yaitu seluruh data tentang PDRB kabupaten di Kediri raya berdasar sektor-sektor lapangan usaha mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.
2. **Sampel** penelitian ini yaitu PDRB kabupaten di Kediri Raya mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Jumlah sampel penelitian ini sebanyak 3 data *time series* dan 5 data *cross section*, sehingga jumlah total sampel yang digunakan sebanyak 13 *pooled data*.
3. **Teknik sampling** penelitian ini menggunakan pengambilan sampel bertujuan (*purposive sampling*) dengan tipe sampel berdasarkan pertimbangan tertentu (*judgment sampling*). Pertimbangan memilih *judgment sampling* yaitu mulai tahun 2010 BPS tidak lagi menggunakan tahun dasar tahun 2000 tetapi menggunakan tahun dasar 2010 untuk menghitung PDRB baik Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha.

C. JENIS, SUMBER DAN PENGUMPULAN DATA

1. **Jenis data** penelitian ini yaitu data panel atau data longitudinal. Manab dan Sujianto menjelaskan bahwa data panel yaitu data yang menggabungkan antara data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*)⁵⁶. Data runtut waktu dalam studi ini yaitu data *sharing* PDRB masing-masing lapangan usaha mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 (tiga tahun) pada kelima kabupaten di Kediri Raya.
2. **Sumber data** penelitian ini yaitu data sekunder. Manab dan Sujianto mendeskripsikan bahwa sumber data sekunder yaitu sumber data tidak langsung yang memberikan data kepada peneliti tetapi melalui dokumen-dokumen yang relevan dengan variabel-variabel penelitian ini⁵⁷. Dokumen-dokumen tersebut

⁵⁶ Abdul Manab dan Agus Eko Sujianto, *Pengaruh Stabilitas Ekonomi Makro terhadap Penerbitan Sukuk Negara di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam*, Tulungagung: Cahaya Abadi, 2016, hlm. 124.

⁵⁷ Abdul Manab dan Agus Eko Sujianto, *Pengaruh Stabilitas*, hlm. 125.

didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur dan BPS pada kelima kabupaten di Kediri Raya.

3. **Teknik pengumpulan data** penelitian ini menggunakan teknik rewiuw dokumen atau dokumenter. Menurut Bailey, metode penelitian dokumenter mengacu pada analisis dokumen yang berisi informasi tentang fenomena yang ingin kita pelajari⁵⁸. Fenomena yang dimaksud yaitu keunggulan komparatif dan kompetitif yang diproyeksi oleh PDRB kabupaten di Kediri Raya baik berdasar harga konstan maupun berdasar harga berlaku menggunakan tahun dasar 2000. Selanjutnya Scott telah merumuskan kriteria pengawasan kualitas untuk menangani sumber dokumente yang terdiri dari: keaslian, kredibilitas, keterwakilan dan makna. Keaslian mengacu pada apakah dokumen itu asli dan dari sumber yang tidak dapat dilawa, kredibilitas mengacu pada apakah bukti itu khas dari jenisnya, keterwakilan mengacu pada apakah dokumen yang dikonsultasikan mewakili keseluruhan dokumen yang relevan, dan artinya mengacu pada apakah bukti tersebut jelas dan dapat dipahami⁵⁹.

D. DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL DAN PENGUKURANNYA

1. **Pertumbuhan ekonomi.** Pertumbuhan ekonomi yang dimaksud dalam studi ini yaitu laju pertumbuhan PDRB, dimana laju PDRB merupakan indikator ekonomi makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang biasanya digunakan untuk menilai sampai berapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode tertentu. Laju PDRB diukur dalam persentase (%) dengan skala pengukuran ratio.
2. **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).** PDRB merupakan total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun. PDRB merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu wilayah/regional. PDRB diukur dalam satuan unit uang dengan skala pengukuran ratio.

⁵⁸ K.D. Bailey, *Methods of Sosial Research*, New York: The Free Press, 1994.

⁵⁹ J. Scott, *A Matter of Record: Documentary Sources in Sosial Research*, Cambridge, UK: Polity Press, 1990.

3. **Lapangan usaha.** Lapangan usaha merupakan bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat bekerja dimana seseorang bekerja. Lapangan usaha yang diamati dalam studi ini merupakan bidang kegiatan yang memiliki kontribusi dalam peningkatan nilai PDRB kabupaten/kota/provinsi, menggunakan seri 2010 yaitu: (1) pertanian, kehutanan dan perikanan; (2) pertambangan dan penggalian; (3) industri pengolahan; (4) pengadaan listrik dan gas; (5) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; (6) konstruksi; (7) perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; (8) transportasi dan pergudangan; (9) penyediaan akomodasi dan makan minum; (10) informasi dan komunikasi; (11) jasa keuangan dan asuransi; (12) *real estate*; (13) jasa perusahaan; (14) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; (15) jasa pendidikan; (16) jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta (17) jasa lainnya.

E. ANALISIS DATA

1. *Location Quotient (LQ).*

Metode LQ merupakan tehnik pengukuran basis ekonomi untuk menentukan sektor basis atau non basis (analisis keunggulan komparatif). Analisis LQ dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan merumuskan komposisi dan pergeseran sektor-sektor basis suatu wilayah dengan menggunakan produk domestik regional bruto (PDRB) sebagai indikator pertumbuhan wilayah. Formula yang digunakan untuk menghitung LQ yaitu:

$$LQ = \frac{PDRB_k}{PDRB_p}$$

Rumus di atas dikembangkan dari Matondang⁶⁰

Keterangan:

xi yaitu nilai tambah sektor i di kabupaten/kota;

PDRB_k, yaitu Produk Domestik Regional Bruto kabupaten/kota;

Xi yaitu nilai tambah sektor i di provinsi;

PDRB_p yaitu Produk Domestik Regional Bruto provinsi.

⁶⁰ Zulaika Matondang, Penerapan Metode Location Quotient (LQ) Dalam Penentuan Sektor Unggulan Di Pulau Sumatera Pada Tahun 2013 dan Kajiannya Dalam Perspektif Islam, *At-Tijarah*, Volume 1, No. 2, Juli-Desember 2015, hlm. 177.

Kriteria yang digunakan untuk menjelaskan hasil uji LQ ini yaitu:

- Jika $LQ > 1$, merupakan sektor basis, artinya tingkat spesialisasi kabupaten /kota lebih tinggi dari tingkat provinsi;
- Jika $LQ = 1$, berarti tingkat spesialisasi kabupaten / kota sama dengan ditingkat provinsi;
- Jika $LQ < 1$, adalah merupakan sektor non basis, yaitu sektor yang tingkat spesialisasi kabupaten/kota lebih rendah dari tingkat provinsi.

2. *Shift Share (SS)*.

Metode SS merupakan metode yang membandingkan perbedaan laju pertumbuhan berbagai sektor di suatu daerah (kabupaten/kota) dengan daerah nasional atau daerah yang ada di atasnya (provinsi). Analisis ini bertujuan untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah (kabupaten/kota) dengan membandingkannya dengan daerah yang lebih besar (provinsi). Rumus untuk menghitung SS didasarkan pada teori Glasson dalam Prishardoyo⁶¹ yaitu:

$$G_j : Y_{jt} - Y_{j0}$$

$$N_j : Y_{j0}(Y_t/Y_0) - Y_{j0}$$

$$(P+D)_j : Y_{jt} - (Y_t/Y_0) Y_{j0}$$

$$P_j : \sum_i [(Y_{it}/Y_{i0}) - (Y_t/Y_0)] Y_{ij0}$$

$$D_j : \sum_t [Y_{ijt} - (Y_{it}/Y_{i0}) Y_{ij0}]$$

Keterangan:

G_j : Pertumbuhan PDRB Total

N_j : Komponen Share

P_j : Proportional Shift

D_j : Diferential Shift

Y : PDRB total Propinsi Jawa Tengah

o, t : Periode Awal dan Periode Akhir

Baransano, *et al* menjelaskan, metode SS merupakan salah satu teknik analisis untuk melihat potensi produksi sektoral dari suatu kawasan/wilayah tertentu dibandingkan dengan suatu referensi (dengan cakupan wilayah lebih luas) dalam dua titik waktu.

⁶¹ Bambang Prishardoyo, Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Potensi Ekonomi Terhadap Produk Domestik Regionalbruto (PDRB) Kabupaten Pati Tahun 2000-2005, *JEJAK*, Volume 1, Nomor 1, September, 2008, hlm. 4.

Pemahaman struktur aktivitas dari hasil SS akan menjelaskan kemampuan berkompetisi aktivitas tertentu di suatu wilayah secara dinamis atau perubahan aktivitas dalam cakupan wilayah yang lebih luas (keunggulan kompetitif)⁶².

⁶² Michael Albert Baransano, Eka Intan Kumala Putri, Noer Azam Achzani dan Lala Kolopaking, Peranan Sektor Unggulan, hlm. 127..

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. DESKRIPSI VARIABEL PENELITIAN

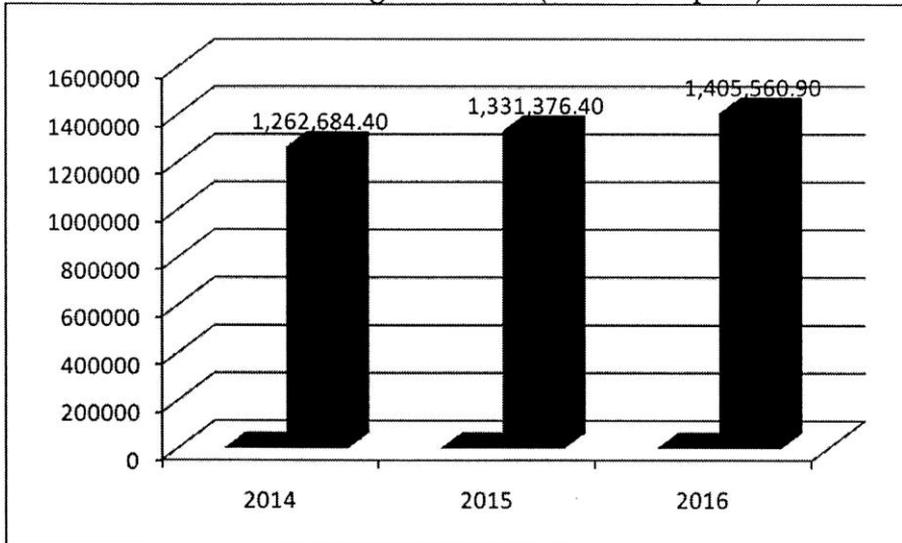
1. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur

Sebagaimana diketahui bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro ekonomi pada tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota). PDRB ini mengukur tingkat output kotor yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi baik secara individu atau orang per orang maupun output kotor yang dihasilkan oleh sektor usaha (perusahaan). Pemerintah selalu berupaya semaksimal mungkin melalui berbagai macam kebijakan makro ekonomi untuk menstabilkan perekonomian. Perekonomian yang stabil akan memungkinkan terjadinya pembangunan yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

PDRB Provinsi Jawa Timur ini merupakan salah satu ukuran kuantitatif ekonomi Jawa Timur dalam kurun waktu tertentu misalnya tahun 2014, 2015, 2016 dan seterusnya. Semakin tinggi nilai PDRB maka semakin tinggi output provinsi yang dihasilkan baik oleh individu pelaku ekonomi maupun yang dihasilkan oleh perusahaan sebagai salah satu pelaku ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dari tahun ke tahun memiliki keinginan yang kuat untuk meningkatkan nilai PDRB provinsi, sehingga dengan demikian dapat terpotret kinerja ekonomi makro dan sekaligus dapat bermanfaat untuk mengukur prestasi ekonomi daerah.

Gambar di bawah ini mendeskripsikan PDRB Provinsi Jawa Timur atas dasar harga konstan dengan mengambil sampel yang singkat yaitu: 2014, 2015 dan tahun 2016 dalam satuan unit uang (Milliar Rupiah).

Gambar 4.1: Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan (Milliar Rupiah)



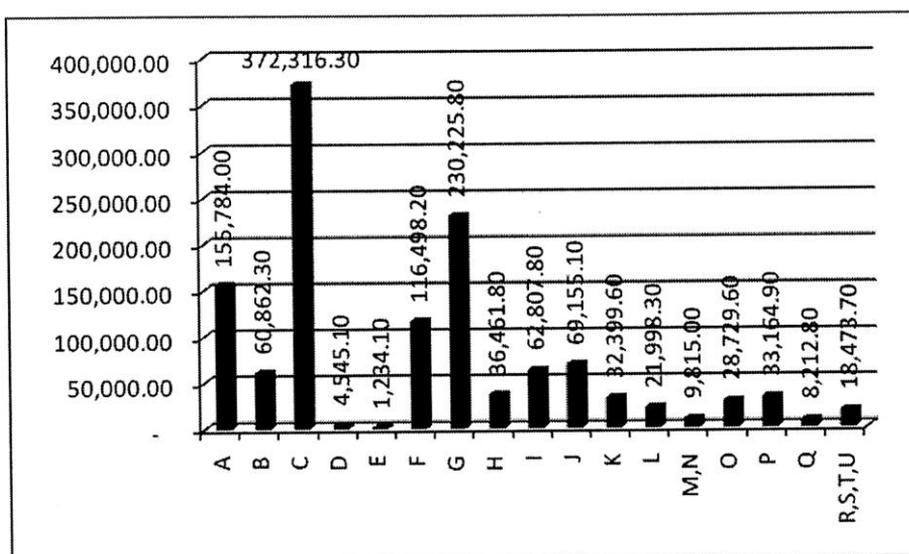
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Diolah (2018)

Berdasar gambar 4.1 di atas dapat dijelaskan bahwa progres ekonomi Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 mengalami peningkatan tipis. Namun demikian peningkatan nilai PDRB ini dapat memperkuat sentimen positif Jawa Timur di kancah perekonomian nasional. Dalam studi ini juga memaparkan tentang PDRB Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (dalam Milliar Rupiah).

Lapangan usaha yang dimaksud yaitu sektor-sektor lapangan usaha yang dapat menghasilkan sejumlah uang dan berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli Provinsi Jawa timur. Disamping itu, lapangan usaha yang menjadi pemikiran penting dalam studi ini digolongkan dalam tujuh belas sektor usaha yaitu: sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor pengadaan listrik dan gas; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; sektor konstruksi; sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan

sepeda motor; sektor transportasi dan pergudangan; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor informasi dan komunikasi; sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor *real estate*; sektor jasa perusahaan; sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; sektor jasa pendidikan; sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta sektor jasa lainnya.

Gambar 4.2: PDRB Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha tahun 2014 Atas Dasar Harga Konstan (Milliar Rupiah)



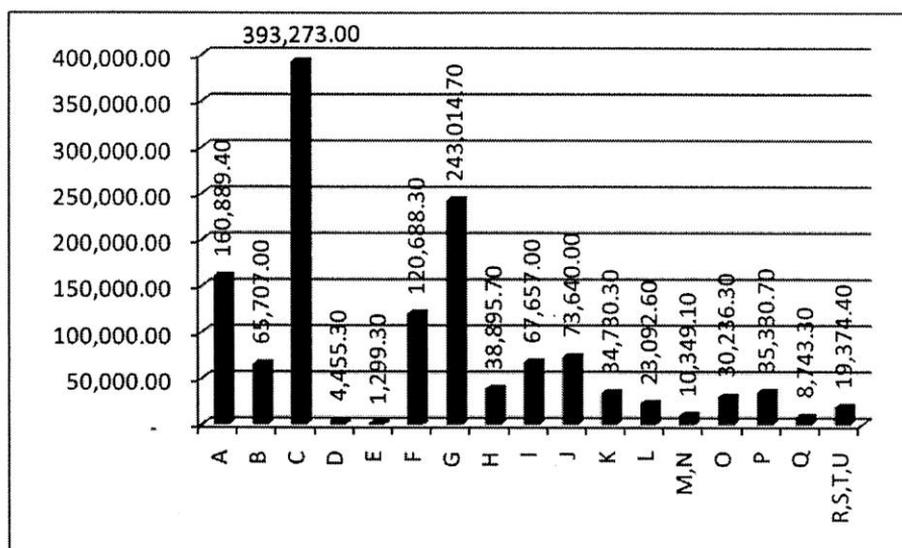
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Diolah (2018)

Berdasar gambar 4.2 di atas dapat dideskripsikan bahwa lima sektor teratas yang memiliki kontribusi terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 yaitu: industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; pertanian, kehutanan dan perikanan; konstruksi; pertambangan dan penggalian. Sedangkan gambar 4.3 menjelaskan mengenai PDRB Provinsi Jawa pada tahun 2015, PDRB yang dihasilkan oleh sektor-sektor berikut ini merupakan empat lapangan usaha teratas dalam membentuk PDRB di Jawa timur yaitu: industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, pertanian, kehutanan dan perikanan, konstruksi.

Industri pengolahan ini diturunkan menjadi 24 sektor antara lain: Industri Makanan; Industri Minuman; Industri Pengolahan

Tembakau; Industri Tekstil; Industri Pakaian Jadi; Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki; Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya; Industri Kertas dan Barang dari Kertas.

Gambar 4.3: PDRB Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha tahun 2015 Atas Dasar Harga Konstan (Milliar Rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Diolah (2018)

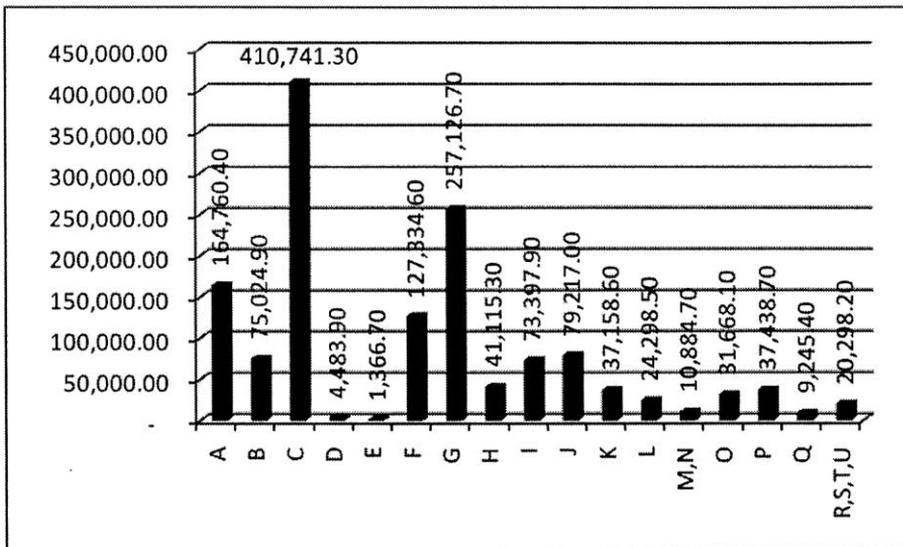
Dibawah ini merupakan perkembangan PDRB Provinsi Jawa Timur menurut lapangan usaha tahun 2016 atas dasar harga konstan (Milliar Rupiah), jika didasarkan pada lima lapangan usaha terbesar yaitu:

1. Industri pengolahan (C);
2. Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (G);
3. Pertanian, kehutanan dan perikanan (A);
4. Konstruksi (F);
5. Pertambangan dan penggalian (B).

Sedangkan data terkait PDRB kabupaten menurut lapangan usaha khususnya di Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Blitar dan Nganjuk dikemukakan atau dideskripsikan dalam bentuk gambar sebagaimana dalam gambar 4.4 sampai dengan 4.24. Periodisasi pengamatan yang dideskripsikan dalam gambar ini yaitu

tahun 2014, 2015 dan 2016, dimana nilai PDRB untuk masing-masing kabupaten sangat bervariasi. Ditinjau dari aspek PDRB menurut lapangan usaha juga sangat bervariasi untuk masing-masing kabupaten yang menjadi lokus penelitian ini.

Gambar 4.4: PDRB Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha tahun 2016 Atas Dasar Harga Konstan (Milliar Rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Diolah (2018)

2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tulungagung

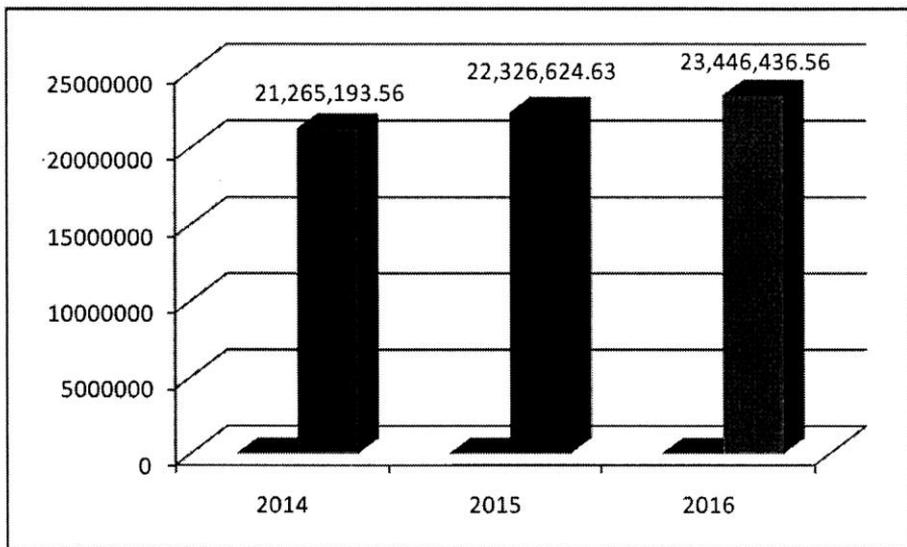
PDRB Kabupaten Tulungagung dalam kurun waktu tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Peningkatan ini tentu tidak terlepas dari sektor-sektor lapangan usaha yang menjadi unggulan Kabupaten Tulungagung yaitu:

- Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (G);
- Industri pengolahan (C);
- Pertanian, kehutanan dan perikanan (A);
- Konstruksi (F);
- Pertambangan dan penggalian (B).

Keempat sektor yang menjadi unggulan di Kabupaten Tulungagung ini bertahan sampai dengan tiga tahun yaitu tahun 2014, 2015 dan 2016. Hasil ini berbeda dengan lapangan usaha unggulan di wilayah Jawa Timur yaitu sektor industry pengolahan,

sedangkan di Kabupaten Tulungagung yang menjadi unggulan yaitu lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Perdagangan besar dan eceran menjadi sektor unggulan karena di Kabupaten Tulungagung sangat kuat sekali budaya wirausahanya khususnya sektor konveksi, logam, seragam militer dan lain sebagainya.

Gambar 4.5: PDRB Kabupaten Tulungagung Atas Dasar Harga Konstan (Milliar Rupiah)

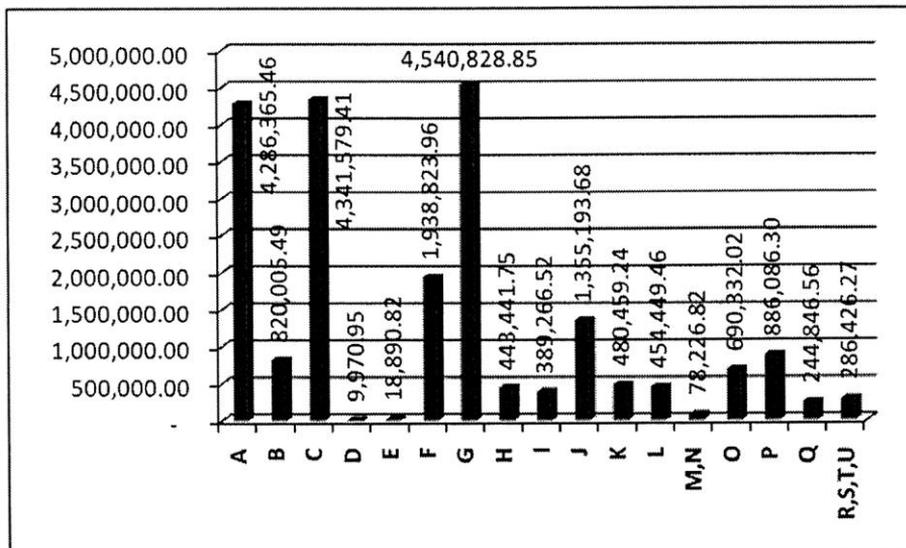


Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung, Diolah (2018)

Pada gambar 4.6 di bawah ini menjelaskan mengenai PDRB Kabupaten Tulungagung menurut lapangan usaha pada tahun 2014 yang didasarkan atas dasar harga konstan (Milliar Rupiah). Berdasar gambar tersebut, lapangan usaha yang berpotensi menyerap tenaga kerja yang terbanyak yaitu sektor-sektor berikut ini:

1. Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (G);
2. Industri pengolahan (C);
3. Pertanian, kehutanan dan perikanan (A);
4. Konstruksi (F);
5. Informasi dan komunikasi (J).

Gambar 4.6: PDRB Kabupaten Tulungagung Menurut Lapangan Usaha tahun 2014 Atas Dasar Harga Konstan (Milliar Rupiah)



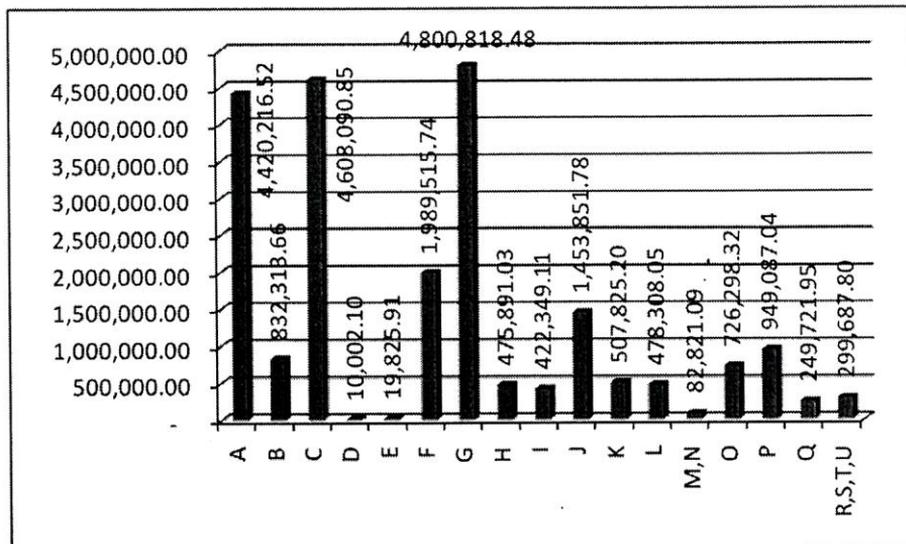
Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung, Diolah (2018)

Gambar 4.7 di bawah ini juga menampilkan mengenai PDRB Kabupaten Tulungagung menurut lapangan usaha pada tahun 2015 yang didasarkan pada harga konstan (dalam Milliar Rupiah). Seperti halnya pada tahun 2014, lapangan usaha yang berkontribusi pada PDRB yaitu:

1. Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (G);
2. Industri pengolahan (C);
3. Pertanian, kehutanan dan perikanan (A);
4. Konstruksi (F);
5. Informasi dan komunikasi (J).

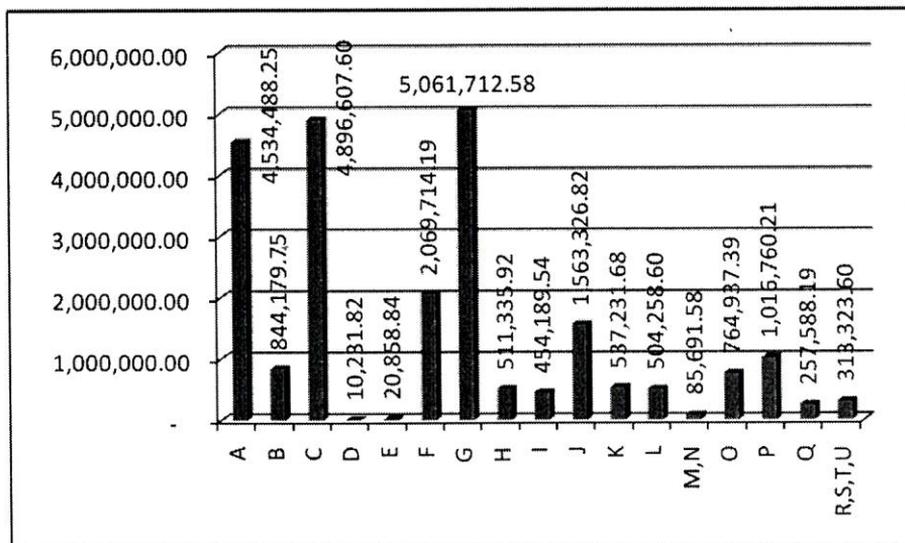
Kondisi yang sama juga ditunjukkan pada tahun 2016 sebagaimana digambarkan pada gambar 4.8 bahwa keempat lapangan usaha sebagaimana pada tahun 2014 dan 2015 masih menjadi lapangan usaha strategis di Kabupaten Tulungagung untuk meningkatkan output daerahnya secara berkesinambungan dan terus menerus.

Gambar 4.7: PDRB Kabupaten Tulungagung Menurut Lapangan Usaha tahun 2015 Atas Dasar Harga Konstan (Milliar Rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung, Diolah (2018)

Gambar 4.8: PDRB Kabupaten Tulungagung Menurut Lapangan Usaha tahun 2016 Atas Dasar Harga Konstan (Milliar Rupiah)



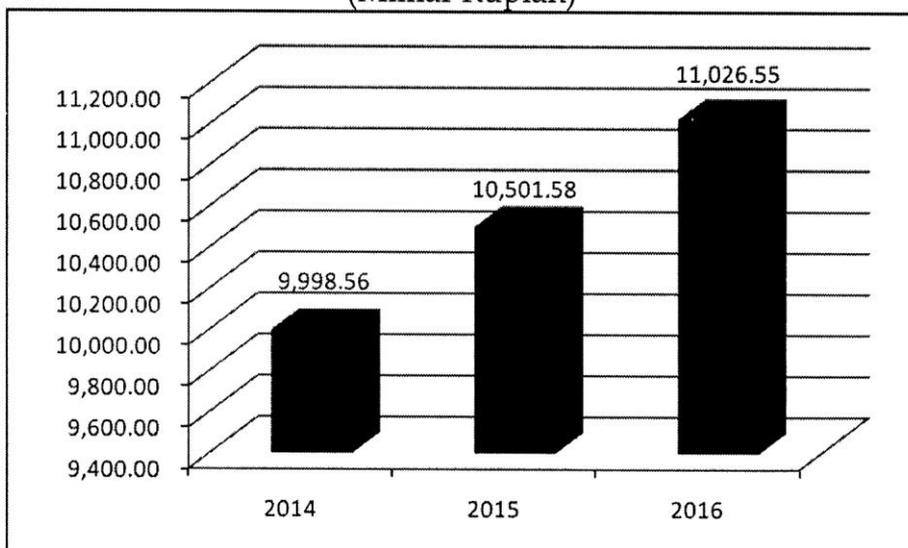
Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung, Diolah (2018)

3. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Trenggalek

Perkembangan PDRB Kabupaten Trenggalek dari tahun 2014-2016 mengalami peningkatan yang signifikan, namun demikian jika dibandingkan dengan Kabupaten Tulungagung, PDRB Kabupaten Trenggalek masih jauh di bawahnya (perhatikan gambar 4.9). Hal ini salah satu diantaranya disebabkan oleh faktor geografis, dimana di Kabupaten Trenggalek wilayahnya didominasi oleh hutan dan pegunungan. Sedangkan Kabupaten Tulungagung masih tersedia lahan pertanian yang sangat luas yang berpotensi untuk membentuk PDRB.

Peningkatan PDRB ini dapat diartikan terjadinya peningkatan kegiatan ekonomi di Kabupaten Trenggalek, khususnya di sektor riil. PDRB yang meningkat ini juga bisa diartikan terjadinya peningkatan kesempatan kerja dan tidak banyak faktor-faktor ekonomi yang mengalami pengangguran. Faktor ekonomi atau faktor produksi yang dimaksud yaitu tenaga kerja, uang, sumber daya alam dan modal, yang kesemuanya secara umum tidak banyak menganggur, dan memanfaatkan semuanya. Inilah prestasi ekonomi Kabupaten Trenggalek di bidang ekonomi, demikian halnya di Kabupaten Tulungagung. Walaupun secara geografis kurang menguntungkan karena banyak hutan dan pegunungan, tetapi pemerintah Kabupaten Trenggalek mampu memanfaatkannya dengan baik.

Gambar 4.9: PDRB Kabupaten Trenggalek Atas Dasar Harga Konstan (Milliar Rupiah)



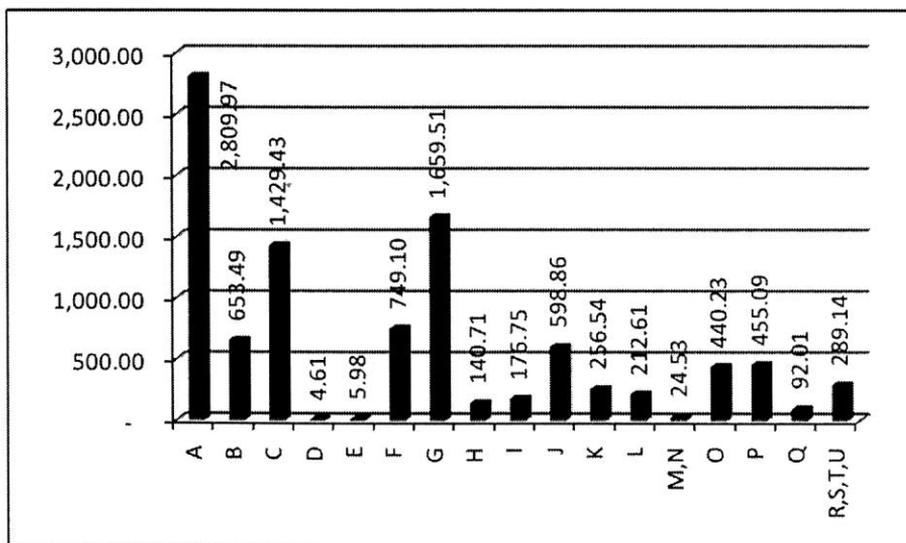
Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek, Diolah (2018)

Gambar 4.10-4.12 di bawah ini merupakan kondisi lapangan usaha yang menjadi unggulan di Kabupaten Trenggalek dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Lapangan usaha unggulan di Kabupaten Trenggalek berbeda jauh jika dibandingkan dengan Kabupaten Tulungagung. Di Kabupaten Trenggalek yang menjadi lapangan usaha unggulan teratas yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (A), sedangkan di Tulungagung sektor lapangan usaha yang menjadi unggulan teratas yaitu Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (G). Berikut ini lima lapangan usaha teratas Kabupaten Trenggalek yaitu:

- Pertanian, kehutanan dan perikanan (A);
- Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (G);
- Industri pengolahan (C);
- Konstruksi (F);
- Pertambangan dan pengalihan (B).

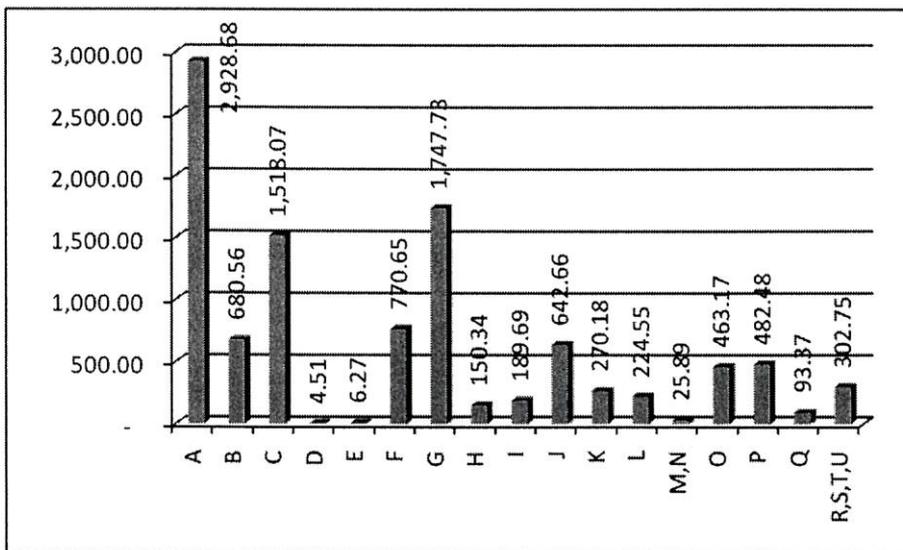
Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi komoditas unggulan Kabupaten Trenggalek karena secara geografis Trenggalek mempunyai sumber daya alam yang melimpah yang sangat berpotensi untuk terus dikembangkan.

Gambar 4.10: PDRB Kabupaten Trenggalek Menurut Lapangan Usaha tahun 2014 Atas Dasar Harga Konstan (Milliar Rupiah)



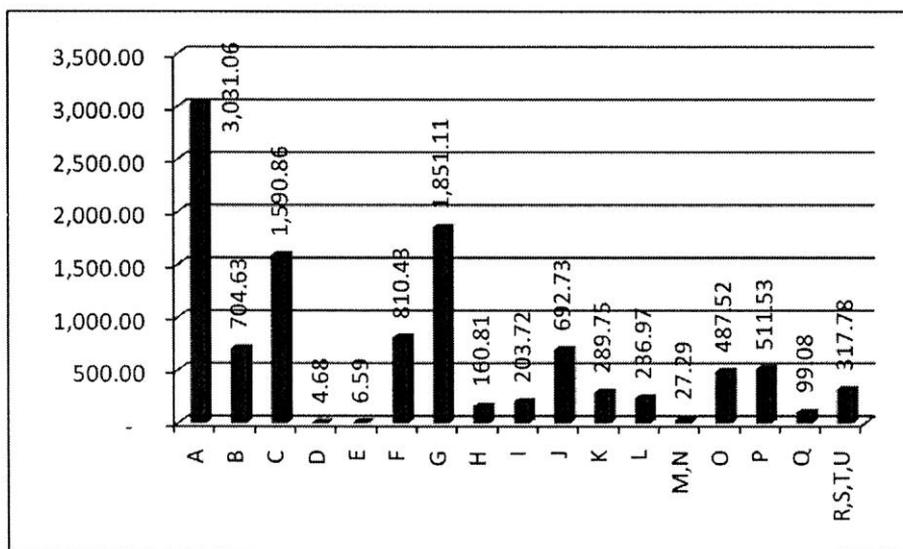
Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek, Diolah (2018)

Gambar 4.11: PDRB Kabupaten Trenggalek Menurut Lapangan Usaha tahun 2015 Atas Dasar Harga Konstan (Milliar Rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek, Diolah (2018)

Gambar 4.12: PDRB Kabupaten Trenggalek Menurut Lapangan Usaha tahun 2016 Atas Dasar Harga Konstan (Milliar Rupiah)

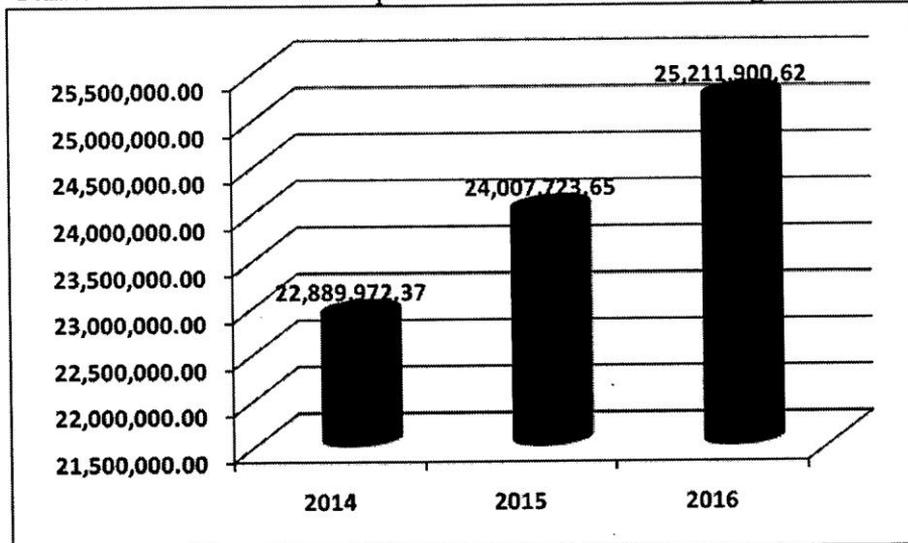


Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek, Diolah (2018)

4. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kediri

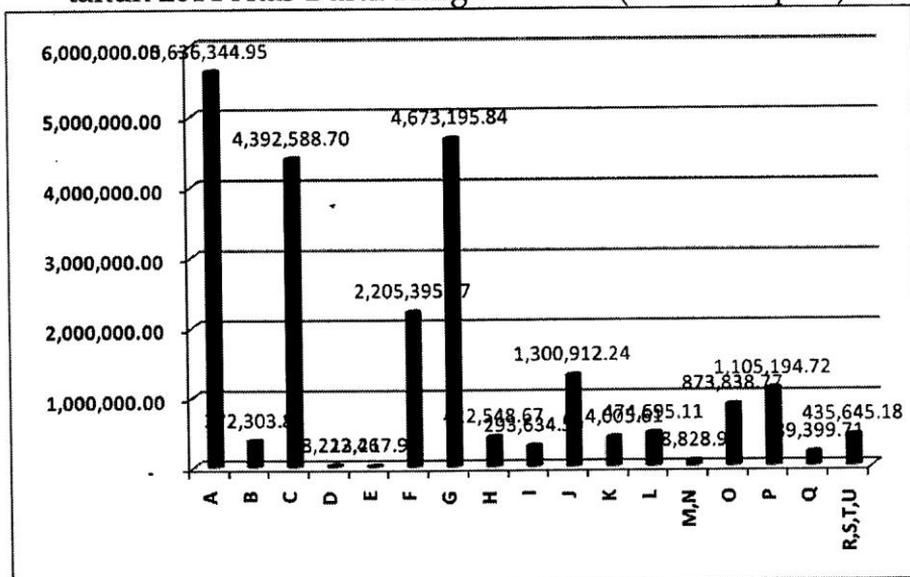
PDRB Kabupaten Kediri dalam kurun waktu tahun 2014-2016 mengalami peningkatan secara meyakinkan sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4.13.

Gambar 4.13: PDRB Kabupaten Kediri Berdasar Harga Konstan



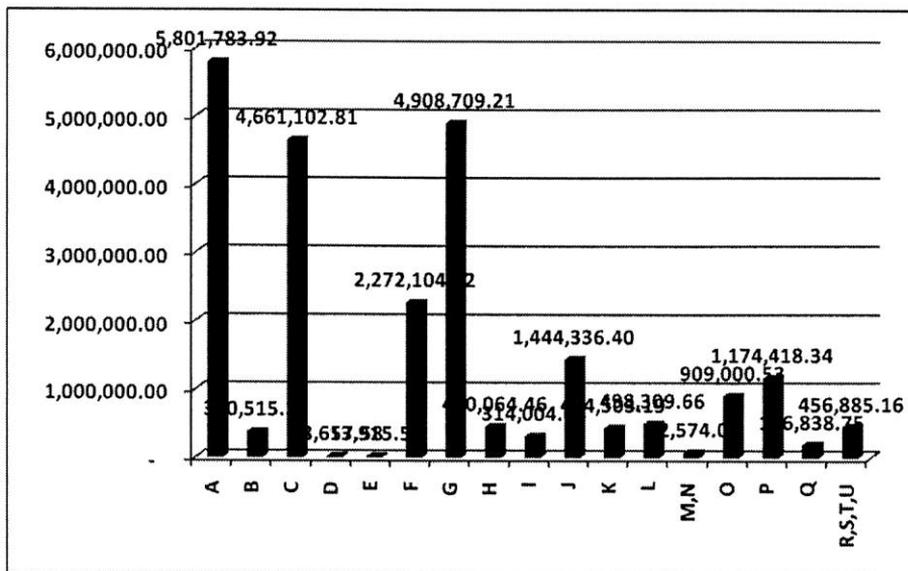
Sumber: BPS Kabupaten Kediri (Milliar Rupiah), Diolah (2018)

Gambar 4.14: PDRB Kabupaten Kediri Menurut Lapangan Usaha tahun 2014 Atas Dasar Harga Konstan (Milliar Rupiah)



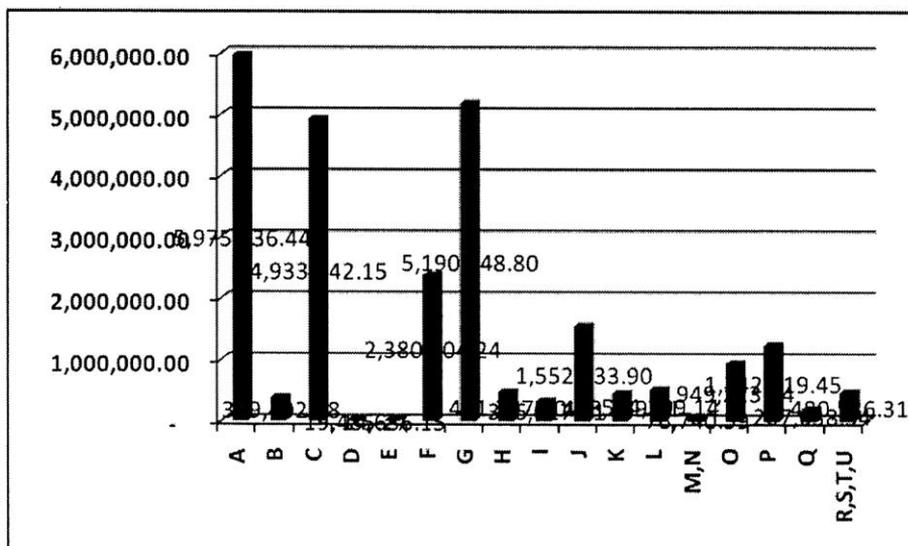
Sumber: BPS Kabupaten Kediri, Diolah (2018)

Gambar 4.15: PDRB Kabupaten Kediri Menurut Lapangan Usaha tahun 2015 Atas Dasar Harga Konstan (Milliar Rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Kediri, Diolah (2018)

Gambar 4.16: PDRB Kabupaten Kediri Menurut Lapangan Usaha tahun 2016 Atas Dasar Harga Konstan (Milliar Rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Kediri, Diolah (2018)

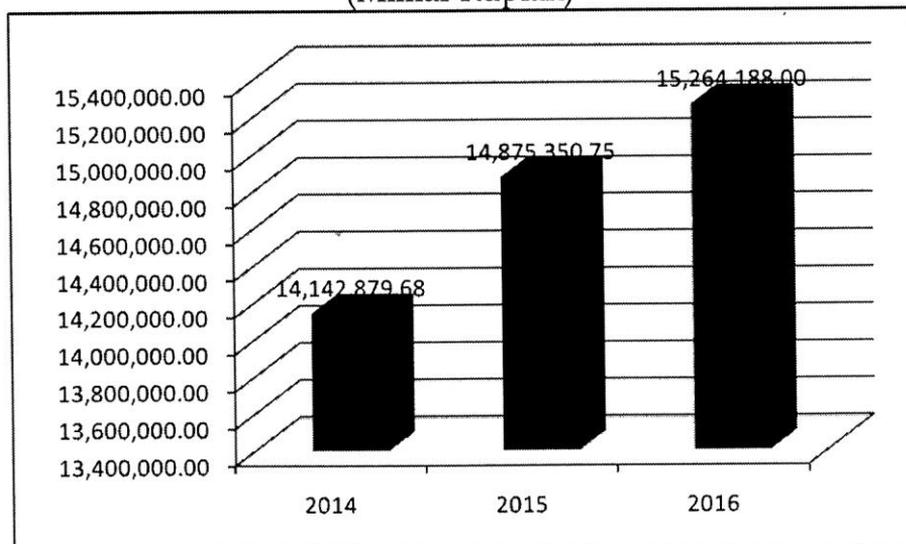
Gambar 4.14-4.16 di atas menjelaskan tentang progres ekoomi Kabupaten Kediri dalam kaitannya dengan sumbangan PDRB masing-masing lapangan usaha teratas dalam meningkatkan kinerja ekonomi daerah khususnya di Kabupaten Kediri. Sektor yang menjadi andalan yang sekaligus unggulan di Kabupaten Kediri yaitu:

1. Pertanian, kehutanan dan perikanan (A);
2. Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (G);
3. Industri pengolahan (C);
4. Konstruksi (F);
5. Informasi dan komunikasi (J).

5. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Nganjuk

Tidak jauh berbeda dengan Kabupaten Tulungagung, Trenggalek dan Kediri, Kabupaten Nganjuk juga meningkat PDRBnya dalam kurun waktu pengamatan, yaitu tahun 2014-2016. Sebagai kabupaten penghasil bawang merah di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk menunjukkan peningkatan kinerjanya sehingga dapat berkontribusi pada PDRB sebagaimana digambarkan pada gambar 4.17.

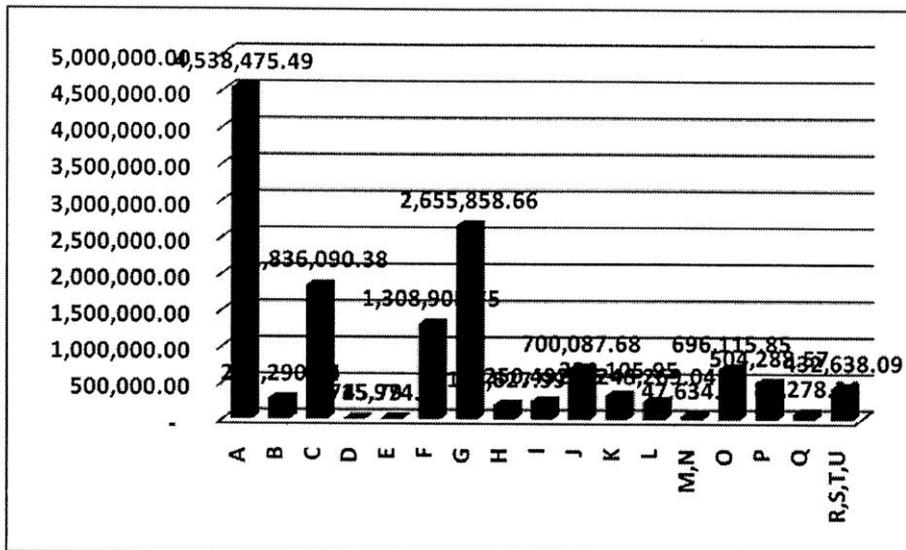
Gambar 4.17: PDRB Kabupaten Nganjuk Atas Dasar Harga Konstan (Milliar Rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk, Diolah (2018)

Sedangkan pada gambar 4.18-4.20 di bawah ini merupakan gambaran PDRB Kabupaten Nganjuk menurut lapangan usaha pada tahun 2014-2016 yang didasarkan pada harga konstan dalam Milliar Rupiah.

Gambar 4.18: PDRB Kabupaten Nganjuk Menurut Lapangan Usaha tahun 2014 Atas Dasar Harga Konstan (Milliar Rupiah)



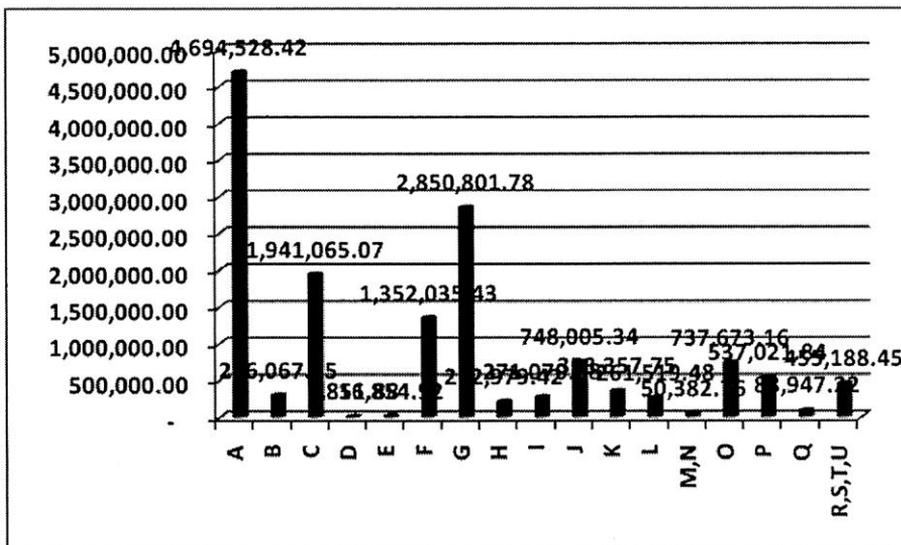
Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk, Diolah (2018)

Dalam kurun waktu tiga tahun yaitu tahun 2014-2016, kinerja perekonomian Kabupaten Nganjuk banyak didorong dinamika pada sektor-sektor yang relatif sama dengan Kabupaten Kediri. Yang membedakan yaitu, jika di Kabupaten Kediri ranking limanya yaitu lapangan usaha pada sektor informasi dan komunikasi, sedangkan di Kabupaten Nganjuk yaitu lapangan usaha di sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Terdapat lima sektor lapangan usaha teratas yang menjadi penggerak ekonomi Kabupaten Nganjuk yaitu:

1. Pertanian, kehutanan dan perikanan (A);
2. Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (G);
3. Industri pengolahan (C);
4. Konstruksi (F);

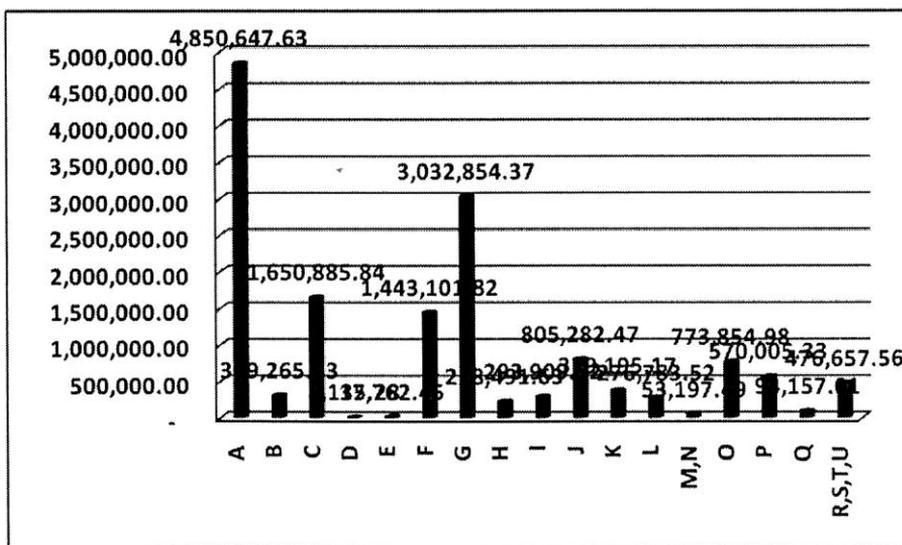
- Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (O).

Gambar 4.19: PDRB Kabupaten Nganjuk Menurut Lapangan Usaha tahun 2015 Atas Dasar Harga Konstan (Milliar Rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk, Diolah (2018)

Gambar 4.20: PDRB Kabupaten Nganjuk Menurut Lapangan Usaha tahun 2016 Atas Dasar Harga Konstan (Milliar Rupiah)



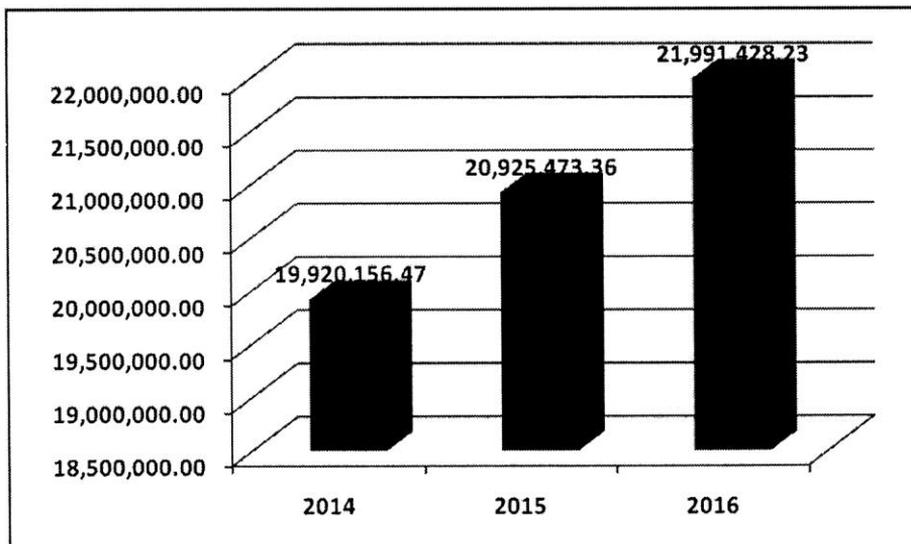
Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk, Diolah (2018)

6. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Blitar

Kabupaten Blitar, atau yang sering disebut dengan Kota Proklamator karena menyimpan “Abune Sang Noto” atau tempat bersemayamnya Bapak Proklamator Bung Karno juga mengalami peningkatan kinerja ekonominya dalam kurun waktu tahun 2014-2016. Peningkatan kinerja ekonomi ini ditunjukkan oleh nilai PDRB, dimana Kabupaten Blitar mampu menyamai Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, Kediri dan Nganjuk, yaitu meningkat kinerja ekonominya dalam tiga tahun terakhir.

Peningkatan kinerja ekonomi ini terus dijaga oleh pemerintah daerah dengan mengeluarkan paket-paket kebijakan yang dapat meningkatkan iklim investasi di daerah, serta meningkatkan sentimen positif terhadap perekonomian daerah dengan melakukan promosi-promosi di luar daerah dengan cara mengikuti promosi atau pameran baik di tingkat provinsi bahkan tingkat nasional. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas khususnya calon investor, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga investor luar negeri. Partisipasi masyarakat Kabupaten Blitar juga menjadi penentu tersampainya potensi Kabupaten Blitar kepada masyarakat luas untuk meningkatkan investasi.

Gambar 4.21: PDRB Kabupaten Blitar Atas Dasar Harga Konstan (Milliar Rupiah)



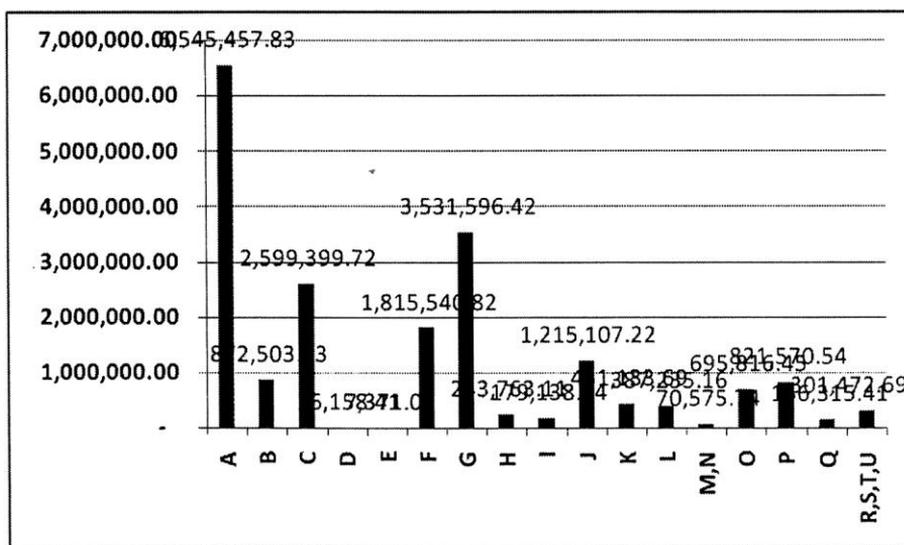
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, Diolah (2018)

Gambar 4.22-4.24 di bawah ini merupakan penyederhanaan kontribusi sektor-sektor lapangan usaha terhadap PDRB Kabupaten Blitar, dimana sektor lapangan usaha teratas yang berkontribusi terhadap PDRB yaitu:

1. Pertanian, kehutanan dan perikanan (A);
2. Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (G);
3. Industri pengolahan (C);
4. Konstruksi (F);
5. Informasi dan komunikasi (J).

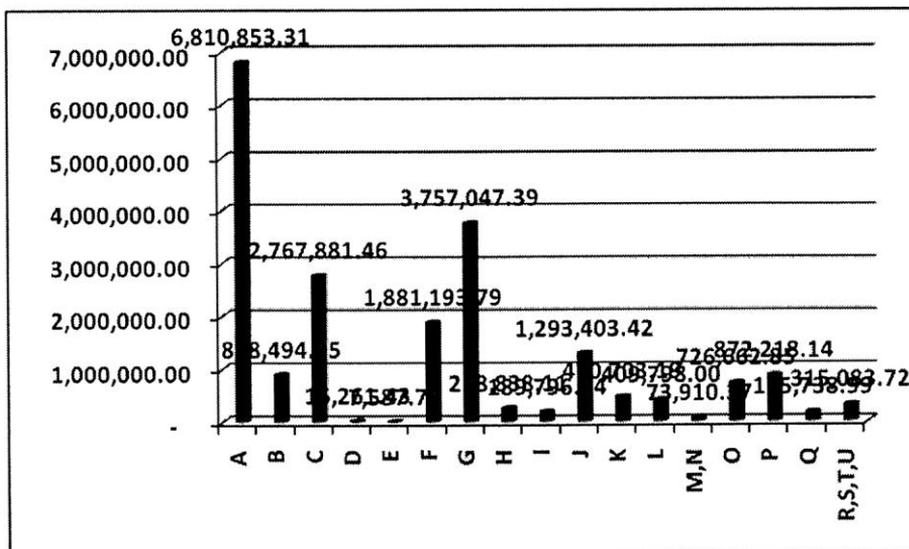
Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor masih menjadi unggulan Kabupaten Blitar. Sektor lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi penopang utama ekonomi daerah yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran dapat diminimumkan. Di Kabupaten Blitar sangat maju sektor pertanian, kehutanan dan perkinannya karena pemerintah daerah sangat peduli dan keberpihakannya terhadap lapangan usaha ini sangat maksimal yang ditunjukkan oleh system irigasi pengairan yang lancar sehingga dapat mengurangi biaya operasional pada sector pertanian ini.

Gambar 4.22: PDRB Kabupaten Blitar Menurut Lapangan Usaha tahun 2014 Atas Dasar Harga Konstan (Milliar Rupiah)



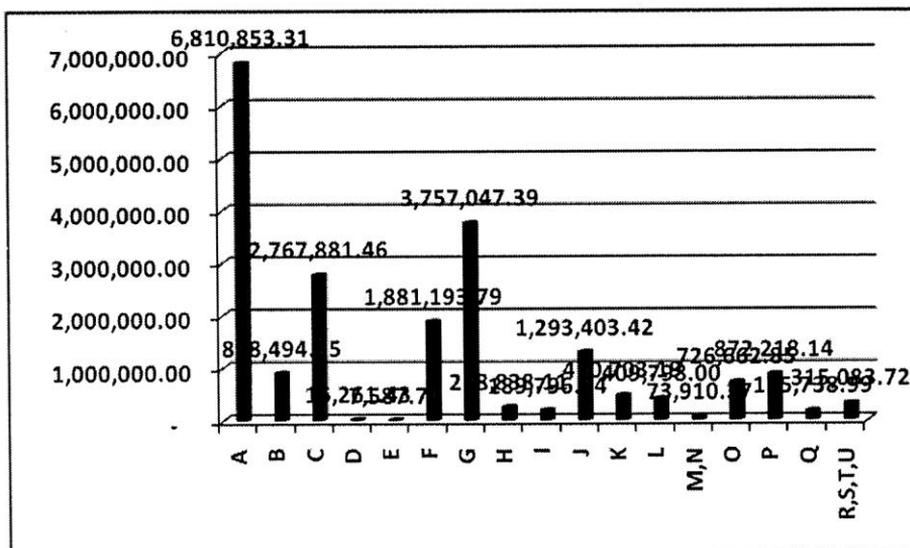
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, Diolah (2018)

Gambar 4.23: PDRB Kabupaten Blitar Menurut Lapangan Usaha tahun 2015 Atas Dasar Harga Konstan (Milliar Rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Blitar, Diolah (2018)

Gambar 4.24: PDRB Kabupaten Blitar Menurut Lapangan Usaha tahun 2016 Atas Dasar Harga Konstan (Milliar Rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Blitar, Diolah (2018)

B. UJI LOCATION QUOTIENT

1. Location Quotient Kabupaten Tulungagung

Tabel 4.1 di bawah ini merupakan hasil analisis data mengenai *Location Quotient* di Kabupaten Tulungagung dengan indikator PDRB menggunakan standar harga konstan 2010.

Tabel 4.1: Analisis Location Quotient (LQ) Kabupaten Tulungagung dengan Indikator PDRB Harga Konstan 2010

Lapangan Usaha (No)	Nilai LQ			Rerata LQ
	2014	2015	2016	
A (1)	1.6338	1.6383	1.6499	1.64
B (2)	0.8000	0.7554	0.6745	0.74
C (3)	0.6924	0.6987	0.7147	0.70
D (4)	0.1303	0.1339	0.1368	0.13
E (5)	0.9089	0.9099	0.9149	0.91
F (6)	0.9882	0.9830	0.9744	0.98
G (7)	1.1711	1.1780	1.1801	1.18
H (8)	0.0594	0.0596	0.0599	0.06
I (9)	0.0594	0.0596	0.0599	0.06
J (10)	1.1636	1.1773	1.1831	1.17
K (11)	0.8805	0.8719	0.8667	0.87
L (12)	0.0594	0.0596	0.0599	0.06
M,N (13)	0.4733	0.4772	0.4719	0.47
O (14)	1.4268	1.4324	1.4480	1.44
P (15)	1.5864	1.6019	1.6281	1.61
Q (16)	1.7702	1.7032	1.6702	1.71
R,S,T,U (17)	0.9206	0.9224	0.9254	0.92

Sumber: Lampiran 3, diolah (2018)

Berdasar tabel di atas dapat dijelaskan bahwa di Kabupaten Tulungagung yang memiliki keunggulan komparatif yaitu sektor lapangan usaha sebagai berikut:

- Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (A1);
- Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (G7);
- Informasi dan Komunikasi (J10);
- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (O14);

- e. Pendidikan (P15);
- f. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial (Q16).

Keenam sektor unggulan di atas didasarkan pada nilai rerata LQ yang artinya jika nilai rerata LQ > 1 maka merupakan sektor basis yang berarti sektor tersebut merupakan tingkat spesialisasi kabupaten/kota lebih tinggi dari tingkat provinsi, sehingga sektor ini merupakan sektor unggulan khususnya di Kabupaten Tulungagung. Sedangkan di Kabupaten Trenggalek dijelaskan pada tabel 4.2 di bawah ini.

2. Location Quotient Kabupaten Trenggalek

Tidak hanya di Kabupaten Tulungagung, sektor lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (A1) juga menjadi lapangan usaha unggulan di Kabupaten Trenggalek. Hal ini ditunjukkan oleh nilai rerata LQ yang lebih besar dibandingkan 1 sehingga secara ekonomi dapat dinyatakan bahwa sektor ini merupakan sektor unggulan daerah. Hasil ini sudah bisa diprediksi dari awal mengingat Kabupaten Trenggalek tipologinya sama dengan Kabupaten Tulungagung, yaitu sebagai kabupaten yang memiliki kekuatan di sektor agraris.

Tabel 4.2: Analisis Location Quotient (LQ) Kabupaten Trenggalek dengan Indikator PDRB Harga Konstan 2010

Lapangan Usaha (No)	Nilai LQ			Rerata LQ
	2014	2015	2016	
A (1)	2.2779	2.3078	2.3451	2.31
B (2)	1.3560	1.3131	1.1972	1.29
C (3)	0.4849	0.4894	0.4937	0.49
D (4)	0.1281	0.1284	0.1329	0.13
E (5)	0.6119	0.6121	0.6150	0.61
F (6)	0.8120	0.8095	0.8113	0.81
G (7)	0.9103	0.9118	0.9177	0.91
H (8)	0.4874	0.4900	0.4986	0.49
I (9)	0.3554	0.3555	0.3538	0.35
J (10)	1.0936	1.1064	1.1147	1.10
K (11)	0.9999	0.9863	0.9940	0.99
L (12)	1.2206	1.2328	1.2432	1.23
M,N (13)	0.3156	0.3172	0.3196	0.32

O (14)	1.9351	1.9421	1.9624	1.95
P (15)	1.7329	1.7313	1.7417	1.74
Q (16)	1.4148	1.3539	1.3661	1.38
R,S,T,U (17)	1.9766	1.9811	1.9956	1.98

Sumber: Lampiran 5, diolah (2018)

Berdasar tabel 4.2, disamping lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (A1), terdapat sektor-sektor lainnya yang juga menjadi unggulan khususnya di Kabupaten Trenggalek. Sektor atau lapangan usaha paling banyak menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran di Kabupaten Trenggalek. Sektor tersebut yaitu:

1. Pertambangan dan penggalian (B2);
2. Informasi dan komunikasi (J10);
3. *Real estate* (L12);
4. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (O14);
5. Jasa pendidikan (P15);
6. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta (Q16).

3. Location Quotient Kabupaten Kediri

Analisis LQ berikutnya di Kabupaten Kediri sebagaimana ditunjukkan oleh tabel 4.3 di bawah ini. Dimana terdapat enam lapangan usaha yang sangat menjanjikan di Kabupaten Kediri. Lapangan usaha ini pada umumnya merupakan sektor yang padat karya, sektor yang banyak merekrut atau menyerap tenaga kerja.

Tabel 4.3: Analisis Location Quotient (LQ) Kabupaten Kediri dengan Indikator PDRB Harga Konstan 2010

Lapangan Usaha	Nilai LQ			Rerata LQ
	2014	2015	2016	
A (1)	1.9958	1.9998	2.0220	2.01
B (2)	0.3374	0.3212	0.2894	0.32
C (3)	0.6508	0.6573	0.6696	0.66
D (4)	0.2212	0.2322	0.2423	0.23
E (5)	0.5908	0.5939	0.5970	0.59
F (6)	1.0443	1.0440	1.0421	1.04

G (7)	1.1197	1.1202	1.1254	1.12
H (8)	0.6393	0.6417	0.6525	0.64
I (9)	0.2579	0.2574	0.2552	0.26
J (10)	1.0377	1.0877	1.0923	1.07
K (11)	0.7049	0.6938	0.6877	0.70
L (12)	1.1904	1.1967	1.2027	1.20
M,N (13)	0.3868	0.3889	0.3931	0.39
O (14)	1.6778	1.6672	1.6710	1.67
P (15)	0.0552	0.0555	0.0557	0.06
Q (16)	1.2721	1.2485	1.2521	1.26
R,S,T,U (17)	0.0552	0.0555	0.0557	0.06

Sumber: Lampiran 7, diolah (2018)

Berdasar tabel di atas dapat dijelaskan bahwa lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (A1) masih menjadi sektor unggulan di wilayah Mataraman khususnya di Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri merupakan salah satu kabupaten di wilayah Mataraman yang tidak saja memiliki kekuatan di sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, tetapi juga memiliki keunggulan komparatif dalam beberapa lapangan usaha yaitu:

1. Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (G);
2. Informasi dan komunikasi (J);
3. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (O);
4. Jasa pendidikan (P);
5. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial (Q).

4. Location Quotient Kabupaten Nganjuk

Kabupaten yang biasa disebut dengan istilah kota angin ini tidak jauh berbeda dengan kabupaten lainnya di wilayah eks Karesidenan Kediri. Nganjuk memiliki potensi pada sektor pertanian terutama pertanian bawang merah disamping padi. Sedangkan tabel 4.4 berikut ini memberikan penjelasan mengenai sektor basis di Kabupaten Nganjuk.

Tabel 4.4: Analisis Location Quotient (LQ) Kabupaten Nganjuk dengan Indikator PDRB Harga Konstan 2010

Lapangan Usaha	Nilai LQ			Rerata LQ
	2014	2015	2016	
A (1)	2.6010	2.6115	2.7110	2.64
B (2)	0.4156	0.4033	0.3796	0.40
C (3)	0.0893	0.0895	0.0921	0.09
D (4)	0.1522	0.1577	0.1671	0.16
E (5)	1.1557	1.1610	1.1968	1.17
F (6)	1.0031	1.0027	1.0436	1.02
G (7)	1.0299	1.0499	1.0861	1.06
H (8)	0.4864	0.4901	0.5117	0.50
I (9)	0.3561	0.3586	0.3687	0.36
J (10)	0.9038	0.9091	0.9361	0.92
K (11)	0.9124	0.9106	0.9397	0.92
L (12)	1.0076	1.0136	1.0489	1.02
M,N (13)	0.4333	0.4357	0.4500	0.44
O (14)	2.1633	2.1836	2.2502	2.20
P (15)	1.3576	1.3604	1.4020	1.37
Q (16)	0.9488	0.9105	0.9378	0.93
R,S,T,U (17)	2.0909	2.1028	2.1623	2.12

Sumber: Lampiran 9, diolah (2018)

Tabel 4.4 di atas merupakan rangkuman uji Location Quotient (LQ) Kabupaten Nganjuk dengan Indikator PDRB Harga Konstan 2010. Uji Location Quotient (LQ) bermanfaat untuk mengidentifikasi sektor-sektor unggulan di suatu daerah. Dan sektor-sektor yang menjadi keunggulan komparatif di Kabupaten Nganjuk yaitu: (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (A1); (2) Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (G); (3) Informasi dan komunikasi (J); (4) Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (O); (5) Jasa pendidikan (P) serta (6) sektor Jasa kesehatan dan kegiatan sosial (Q).

5. Location Quotient Kabupaten Blitar

Sedangkan di Kabupaten Blitar, seperti halnya dengan Kabupaten Tulungagung, Kediri dan Trenggalek, yang kuat sektor lapangannya yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Hal ini sangat beralasan mengingat Kabupaten Blitar memiliki lahan pertanian yang luas, kawasan hutan yang luas, dan juga kuat dalam perikanan baik ikan air tawar maupun ikan air laut. Tabel 4.5 di bawah ini menjelaskan mengenai sektor-sektor unggulan yang berpotensi dalam menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran di Kabupaten Blitar bisa teratasi.

Tabel 4.5: Analisis Location Quotient (LQ) Kabupaten Blitar dengan Indikator PDRB Harga Konstan 2010

Lapangan Usaha	Nilai LQ			Rerata LQ
	2014	2015	2016	
A (1)	2.6633	2.6934	2.7269	2.69
B (2)	0.9087	0.8700	0.7970	0.86
C (3)	0.4426	0.4478	0.4571	0.45
D (4)	0.2253	0.2322	0.2329	0.23
E (5)	0.3786	0.3716	0.3722	0.37
F (6)	0.9878	0.9917	0.9989	0.99
G (7)	0.9723	0.9836	0.9921	0.98
H (8)	0.4238	0.4234	0.4255	0.42
I (9)	0.1808	0.1785	0.1773	0.18
J (10)	1.1138	1.1175	1.1296	1.12
K (11)	0.8826	0.8623	0.8578	0.87
L (12)	1.1158	1.1291	1.1439	1.13
M,N (13)	0.4558	0.4544	0.4555	0.46
O (14)	1.5352	1.5291	1.5299	1.53
P (15)	1.5702	1.5707	1.5729	1.57
Q (16)	1.2836	1.2788	1.2785	1.28
R,S,T,U (17)	1.0344	1.0347	1.0403	1.04

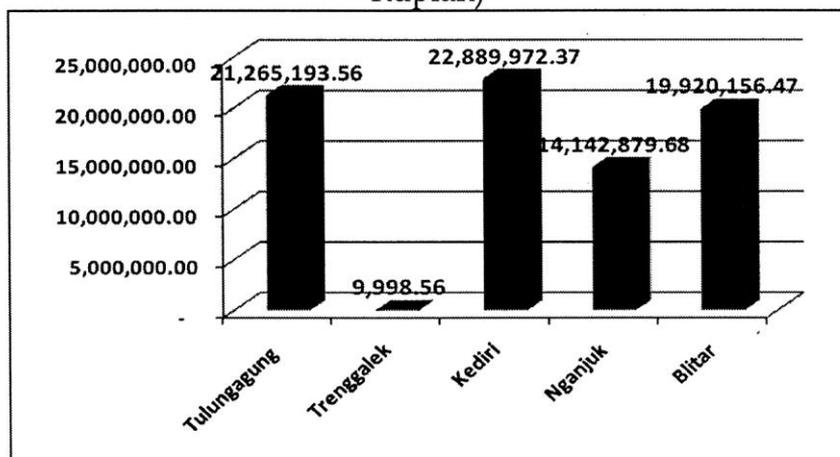
Sumber: Lampiran 11, diolah (2018)

Tabel 4.5 di atas secara rinci memberikan gambaran mengenai lapangan usaha yang menjadi unggulan daerah terutama di Kabupaten Blitar. Seperti halnya kabupaten-kabupaten lainnya di wilayah Mataraman, yang menjadi kekuatan Kabupaten Blitar yaitu sektor-sektor yang memang berorientasi pada sektor yang padat karya. Sektor lapangan usaha ini yaitu:

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (A1)
2. Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (G);
3. Informasi dan komunikasi (J);
4. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (O);
5. Jasa pendidikan (P);
6. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial (Q).

Berdasar analisis data, berikut ini dikemukakan tentang perkembangan PDRB Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Nganjuk dan Kabupaten Blitar dalam kurun waktu tahun 2014-2016.

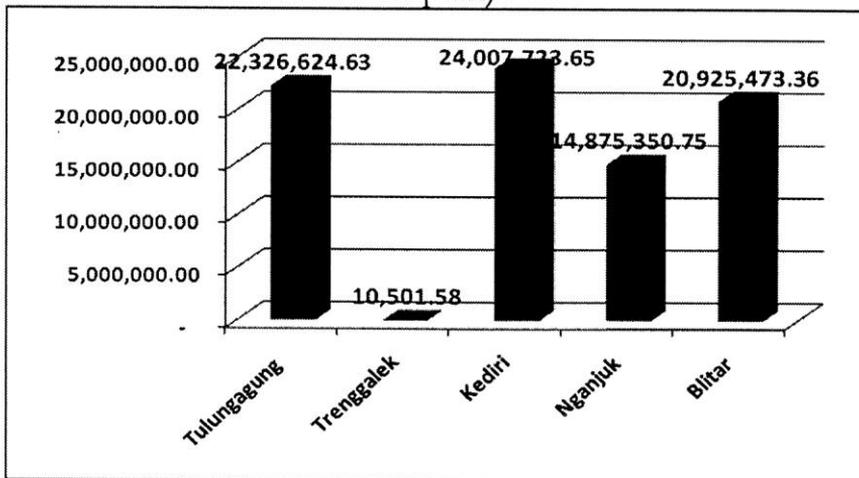
Gambar 4.25: PDRB Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Nganjuk dan Blitar tahun 2014 Atas Dasar Harga Konstan (Milliar Rupiah)



Sumber: Data Sekunder, Diolah

Berdasar gambar di atas, pada tahun 2014 kabupaten yang PDRB-nya tertinggi yaitu: Kabupaten Kediri, Tulungagung, Blitar, Nganjuk dan Kabupaten Trenggalek.

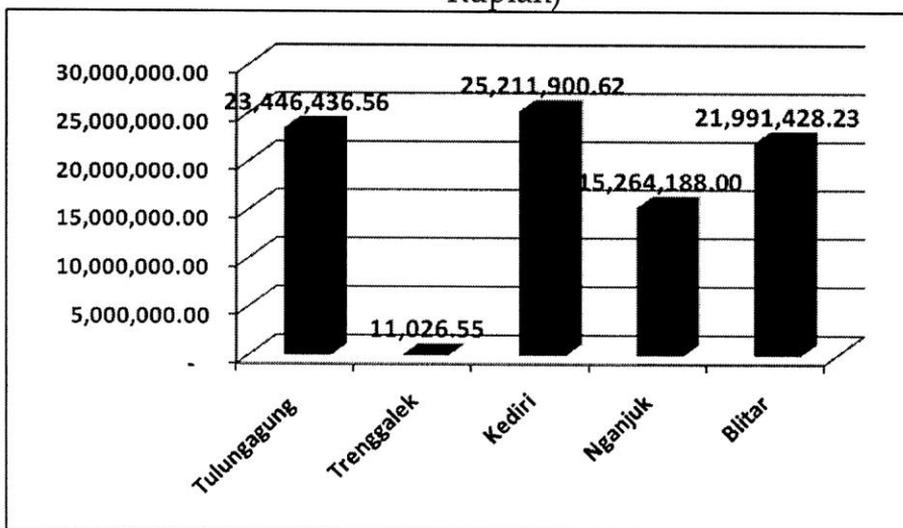
Gambar 4.26: PDRB Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Nganjuk dan Blitar tahun 2015 Atas Dasar Harga Konstan (Milliar Rupiah)



Sumber: Data Sekunder, Diolah

Berdasar gambar di atas, pada tahun 2015 kabupaten yang PDRB-nya tertinggi yaitu: Kabupaten Kediri, Tulungagung, Blitar, Nganjuk dan Kabupaten Trenggalek.

Gambar 4.27: PDRB Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Nganjuk dan Blitar tahun 2016 Atas Dasar Harga Konstan (Milliar Rupiah)



Sumber: Data Sekunder, Diolah

Berdasar gambar di atas, pada tahun 2016 kabupaten yang PDRB-nya tertinggi yaitu: Kabupaten Kediri, Tulungagung, Blitar, Nganjuk dan Kabupaten Trenggalek.

BAB V

PEMBAHASAN

A. KONTRIBUSI SEKTOR-SEKTOR LAPANGAN USAHA YANG MENJADI SEKTOR BASIS DAN NON BASIS DALAM PEREKONOMIAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

Sektor-sektor lapangan usaha yang menjadi kajian utama dalam studi ini dibedakan menjadi tujuh belas lapangan usaha yang terdiri dari: (1) pertanian, kehutanan dan perikanan; (2) pertambangan dan penggalian; (3) industri pengolahan; (4) pengadaan listrik dan gas; (5) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; (6) konstruksi; (7) perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; (8) transportasi dan pergudangan; (9) penyediaan akomodasi dan makan minum; (10) informasi dan komunikasi; (11) jasa keuangan dan asuransi; (12) *real estate*; (13) jasa perusahaan; (14) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; (15) jasa pendidikan; (16) jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta (17) jasa lainnya.

Berdasar hasil analisis data pada bab empat dapat dijelaskan bahwa sektor dengan nomor urut A (1) yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor basis. Makna dari pernyataan ini bahwa pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Tulungagung secara statistic menjadi sektor unggulan karena nilai rerata LQ lebih besar dibandingkan dengan 1. Lapangan usaha dengan nomor urut B (2) yaitu pertambangan dan penggalian dalam studi ini menjadi sektor non basis atau bukan menjadi sektor

unggulan, karena tingkat spesialisasinya lebih rendah dari 1 dan lebih kecil dari spesialisasi tingkat provinsi Jawa Timur.

Hasil studi ini juga menjelaskan bahwa sektor lapangan usaha yaitu: pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; konstruksi; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; jasa keuangan dan asuransi; *real estate*; jasa perusahaan serta jasa lainnya tidak menjadi sektor unggulan di Kabupaten Tulungagung.

Sementara itu, sektor lapangan usaha seperti perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; informasi dan komunikasi; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial menjadi sektor unggulan di Kabupaten Tulungagung, disamping sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Hasil penelitian ini relevan dengan laporan Badan Pusat Statistik bahwa sektor-sektor yang menjadi andalan di Kabupaten Tulungagung yaitu sektor-sektor sebagai berikut:

1. Pertanian, kehutanan dan perikanan. Sektor ini meliputi pertanian tanaman, peternakan, perburuan. Untuk sub sektor kehutanan meliputi kehutanan itu sendiri, pemanenan kayu dan hasil hutan selain kayu. Sementara sub sektor perikanan meliputi ikan air tawar dan air laut.
2. Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Komponen-komponen dari sektor ini yaitu: perdagangan, reparasi, perawatan mobil dan sepeda motor. Disamping itu ada juga perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor. Sedangkan perdagangan eceran meliputi perdagangan eceran bukan mobil dan motor.
3. Informasi dan komunikasi. Sektor ini diperkuat subsektor sebagai berikut: aktivitas penerbitan, aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televise, perekaman suara dan penerbitan music. Kemudian ada aktivitas penyiaran dan pemrograman, telekomunikasi, aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan lainnya serta aktivitas jasa informasi.
4. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib.
5. Jasa pendidikan

6. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial, yang meliputi: aktivitas kesehatan manusia, aktivitas kesehatan sosial di dalam Panti serta aktivitas sosial di luar Panti⁶³.

Hasil penelitian ini relevan dengan studi yang dilakukan oleh Arifien, *et al* bahwa di Kabupaten Wonosobo lapangan usaha yang menjadi keunggulan komparatif yaitu sector pertanian, kehutanan dan perikanan. Untuk menguji keunggulan komparatif dalam studinya menggunakan analisis *Location Quotient (LQ)* ⁶⁴. Disamping itu, penentuan keunggulan komparatif pada suatu daerah dalam rangka untuk meminimalisir terjadinya ketimpangan pembangunan daerah sebagaimana dikemukakan oleh Baransano, *et al*.

Menurut Baransano, *et al* pendekatan *Location Quotient Analysis* digunakan untuk menunjukkan terjadinya ketimpangan ekonomi dan pembangunan pada suatu wilayah. Dalam studinya menjelaskan sektor pertanian masih besar dan terbanyak kontribusinya terhadap peningkatan PDRB di Papua Barat dalam kurun waktu tahun 2005-2013. Sektor-sektor yang menjadi keunggulan komparatif daerah ini bisa menjadi salah satu bahan bagi pemerintah daerah untuk membuat rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang yang kedepannya bisa menjadi mesin untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sekaligus bisa menjadi solusi untuk menghindari permasalahan sosial dan ekonomi, salah satunya masalah ketimpangan pembangunan dan ekonomi⁶⁵.

B. KONTRIBUSI SEKTOR-SEKTOR LAPANGAN USAHA YANG MENJADI SEKTOR BASIS DAN NON BASIS DALAM PEREKONOMIAN DI KABUPATEN TRENGGALEK

Terdapat persamaan dalam kaitannya dengan sektor-sektor basis yang menjadi andalan Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Tulungagung dalam sektor-sektor tertentu. Namun juga ada perbedaan, terutama yang tidak terdapat di Kabupaten Tulungagung, dan ada di Kabupaten Trenggalek yaitu sektor

⁶³ Badan Pusat Statistik, Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

⁶⁴ Moch. Arifien, Fafurida, dan Vitradesie Noekent, Perencanaan Pembangunan, 2012.

⁶⁵ Michael Albert Baransano, Eka Intan Kumala Putri, Noer Azam Achzani dan Lala Kolopaking, Peranan Sektor, 2016.

pertambangan dan penggalan, dan sektor real estate. Yang sama dengan Kabupaten Tulungagung masih pada sektor-sektor agraris yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan; Informasi dan Komunikasi; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Hasil studi ini relevan dengan penelitian Amalia bahwa di Kabupaten Bone Bolango dengan menggunakan *Location Quotient* (LQ) dapat diketahui bahwa terdapat tiga sektor yang menjadi basis perekonomian yaitu sektor pertanian, industri pengolahan serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Ketiga sector ini sangat melekat dengan identitas Kabupaten Bone Bolango yaitu sebagai kabupaten yang kuat sector agrarisnya sehingga menjadi tulang punggung kehidupan perekonomian di kabupaten ini⁶⁶.

Disamping itu, studi ini juga mendukung penelitian Yurliana, *et al*, bahwa di Kabupaten Batanghari, sector unggulan daerah yang sekaligus menjadi urat nadi perekonomian daerah yaitu sector pertanian, industri, bangunan dan konstruksi serta sector perdagangan. Disamping sector-sektor tersebut yang menjadi produk unggulan di Kabupaten Batanghari yaitu sector jasa-jasa, listrik dan sector pengangkutan. Sedangkan sector yang kurang prospektif yaitu sector keuangan dan sector pertambangan⁶⁷.

C. KONTRIBUSI SEKTOR-SEKTOR LAPANGAN USAHA YANG MENJADI SEKTOR BASIS DAN NON BASIS DALAM PEREKONOMIAN DI KABUPATEN KEDIRI

Sector pertanian masih menjadi lapangan usaha utama di Kabupaten Kediri. Disamping itu, sector-sektor lainnya yang menjadi sector basis di Kabupaten Kediri yaitu: Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (G); Industri pengolahan (C); Konstruksi (F) serta Informasi dan komunikasi (J). Industri pengolahan misalnya PT Gudang Garam, Tbk meskipun berada di Kabupaten Kediri namun keberadaannya tidak menjadi ranking pertama dalam kontribusinya sebagai sector basis di Kabupaten Kediri.

⁶⁶ Fitri Amalia, Penentuan Sektor, 2014.

⁶⁷ Yurliana; M. Rachmad R. ; Selamet Rachmadi, Analisis Sektor, 2015.

Hasil studi ini mendukung penelitian Prishardoyo yang menjelaskan, perkembangan perekonomian di suatu daerah tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah daerah tersebut dalam mengelola sumberdayanya. Disamping itu, kemitraan dengan berbagai pihak misalnya perusahaan-perusahaan dan sector swasta lainnya serta pemerintah daerah lainnya juga menjadi pendorong terwujudnya ekonomi daerah yang maju, adil dan makmur. Kemitraan antar berbagai institusi atau lembaga ini diharapkan dapat menjadi sector untu mengurangi pengangguran sehingga pendapatan per kapita bisa ditingkatkan⁶⁸.

Studi yang sama ditunjukkan oleh Keratorop, *et al* bahwa untuk menentukan sector basis atau sector unggulan daerah menggunakan analisis *Location Quotient (LQ)*. Di Kabupaten Boven Dioel bahwa sector ekonomi yang menjadi basis ekonomi yaitu sector pertanian kering seperti ubi jalar, padi, jagung dan kacang yang sekaligus merupakan komoditas unggulan terutama pada komoditas pangan⁶⁹. Mengingat sector pertanian menjadi unggulan baik di Kabupaten Kediri maupun Kabupaten Boven Digoel maka diperlukan upaya-upaya strategis oleh pemerintah daerah untuk memberikan fasilitasi sarana dan prasarana pertanian misalnya pengairan dan obat-obatan.

D. KONTRIBUSI SEKTOR-SEKTOR LAPANGAN USAHA YANG MENJADI SEKTOR BASIS DAN NON BASIS DALAM PEREKONOMIAN DI KABUPATEN NGANJUK

Sebagai salah satu lumbung bahan pangan di Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk memiliki keunggulan komparatif dalam menghasilkan komoditas pertanian strategis misalnya padi dan bawang merah. Hasil studi ini mendukung penelitian Keratorop, *et al* bahwa untuk mengidentifikasi sector basis menggunakan teknik *Location Quotient (LQ)*⁷⁰ dan juga relevan dengan penelitian Prishardoyo⁷¹. Sebagai salah satu sector unggulan, sector pertanian ini perlu dipromosikan baik secara internal dan eksternal. Secara internal perlu dipromosikan kepada penduduk setempat tentang arti pentingnya sector pertanian untuk menopang perekonomian daerah.

⁶⁸ Bambang Prishardoyo, *Analisis Tingkat*, 2008.

⁶⁹ Marianus Keratorop, Widiatmaka, Suwardi, *Arahan Pengembangan*, 2016.

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ Bambang Prishardoyo, *Analisis Tingkat*, 2008.

Swasembada pangan sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menuju kemandirian ekonomi.

Sedangkan promosi secara eksternal dimaksudkan untuk mengenalkan produk-produk daerah kepada pihak eksternal di luar daerah. Promosi eksternal ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di luar kabupaten tentang keunggulan daerah dan menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten/kota. Pendapatan asli daerah ini yang selanjutnya dapat digunakan sebagai cara untuk memotret tingkat kemakmuran suatu bangsa, mengingat kemakmuran suatu bangsa salah satunya diukur oleh kemakmuran dan keberdayaan ekonomi pada masyarakat di tingkat kabupaten/kota.

E. KONTRIBUSI SEKTOR-SEKTOR LAPANGAN USAHA YANG MENJADI SEKTOR BASIS DAN NON BASIS DALAM PEREKONOMIAN DI KABUPATEN BLITAR

Tidak jauh berbeda dengan Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, Kediri dan Kabupaten Nganjuk bahwa yang menjadi lapangan usaha basis di Kabupaten Blitar yaitu lapangan usaha di sector pertanian, kehutanan dan perikanan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu Arifien, *et al*⁷², Baransano, *et al*⁷³ dan Amalia⁷⁴ bahwa sector pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi lapangan usaha yang berpotensi untuk menyerap tenaga kerja. Disamping itu komoditas-komoditas yang dihasilkan oleh sector ini merupakan komoditas primer yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga jika terjadi kelangkaan terhadap komoditas ini akan membawa dampak terhadap penurunan kinerja secara keseluruhan.

Penurunan kinerja ini tidak saja terkait dengan masalah-masalah ekonomi yang tidak saja masalah pengangguran tetapi juga masalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar dan penurunan cadangan devisa. Pertumbuhan ekonomi terkait output produksi yang dihasilkan oleh negara atau pemerintah daerah. Jika ditingkat nasional disebut pertumbuhan ekonomi nasional sedangkan

⁷² Moch. Arifien, Fafurida, dan Vitradesie Noekent, *Perencanaan Pembangunan*, 2012.

⁷³ Michael Albert Baransano, Eka Intan Kumala Putri, Noer Azam Achzani dan Lala Kolopaking, *Peranan Sektor*, 2016.

⁷⁴ Fitri Amalia, *Penentuan Sektor*, 2014.

pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah dihitung berdasar nilai Product Domestic Regional Bruto (PDRB). Sedangkan inflasi terkait kenaikan harga-harga baik di tingkat nasional maupun daerah yang tentunya berimplikasi pada daya beli masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasar analisis data dan pembahasan secara umum dapat disimpulkan bahwa:

1. Perkembangan PDRB di Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan dalam kurun waktu pengamatan, serta lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan komoditas unggulan.
2. Kinerja ekonomi dalam bentuk PDRB di Kabupaten Trenggalek meningkat seiring dengan peningkatan pola konsumsi, serta lapangan usaha di sector pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sector basis yang menjadi komoditas unggulan.
3. Prestasi ekonomi Kabupaten Kediri yang diukur oleh PDRB juga mengalami peningkatan. Peningkatan PDRB di Kabupaten Kediri ini salah satunya disebabkan oleh peningkatan kinerja lapangan usaha di sector pertanian, kehutanan dan perikanan.
4. Sebagai salah satu penghasil utama bawang merah di Jawa Timur, kinerja ekonomi Kabupaten Nganjuk berdasarkan nilai PDRB meningkat dalam kurun waktu pengamatan, dan sector lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi salah satu komoditas unggulan.
5. Ekonomi Kabupaten Blitar meningkat dalam tiga tahun terakhir. Peningkatan prestasi ekonomi dalam hal pencapaian PDRB ini disumbang oleh peningkatan potensi lapangan usaha di sector pertanian, kehutanan dan perikanan.

6. Ranking perolehan PDRB pada kabupaten yang dijadikan lokus penelitian yaitu: Kabupaten Kediri, Tulungagung, Blitar, Nganjuk dan Kabupaten Trenggalek.

B. SARAN

1. Secara teoretis disarankan untuk memperhatikan aspek lapangan usaha dalam mengkaji tentang keunggulan komparatif dan kompetitif.
2. Secara praktis disarankan kepada pemerintah daerah untuk menyusun rencana strategis yang berbasis sector lapangan usaha pertanian, kehutanan dan pengairan mengingat sector ini menggunakan prinsip padat karya. Bagi investor, mengingat wilayah mataraman sangat luas dan didominasi oleh sector pertanian, kehutanan dan perikanan, maka disarankan untuk membuat pabrik (misalnya pupuk) mengingat konsumen sangat banyak, dan lahan sangat luas. Bagi peneliti yang akan datang, hasil penelitian ini bisa dilakukan perluasan kajian misalnya dengan melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam berprofesi sebagai seorang petani, mengingat animo masyarakat untuk berprofesi sebagai buruh tani sekarang ini yang kecenderungannya mengalami penurunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah, Cetakan Pertama*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 4.
- Afrizal, Fitrah, *Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah dan Tenaga Kerja Terhadap Terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2011*, Makasar, hlm. 12.
- Amalia, Fitri, Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Wilayah di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 15, Nomor 1, Juni 2014, hlm. 19-26.
- Anonymous, Dorong Pertumbuhan Ekonomi, BI Kediri Gelar Forum Ekonomi dan Bisnis 2016, <https://www.bangsaonline.com/berita/21070/dorong-pertumbuhan-ekonomi-bi-kediri-gelar-forum-ekonomi-dan-bisnis-2016>, Akses 30 Maret 2017.
- Arifien, Moch.; Fafurida dan Noekent, Vitradesie, Perencanaan Pembangunan Berbasis Pertanian Tanaman Pangan Dalam Upaya Penanggulangan Masalah Kemiskinan, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 13, Nomor 2, Desember 2012, hlm.288-302.
- Arifin, Imamul dan Gina Hadi W., *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Bandung: Grafindo, 2009), hlm. 11.
- Arsyad, Lincolin, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), hlm. 116.
- Badan Pusat Statistik, *Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2015.
- Badan Pusat Statistik, *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha*, Sumatera Selatan: BPS, 2015, hlm.1.
- Bailey, K.D., *Methods of Sosial Research*, New York: The Free Press, 1994.
- Bank Indonesia, *Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Sumatera Selatan, Vol. 14, No 2*, 2014, hlm. 134.

- Baransano, Michael Albert; Putri, Eka Intan Kumala; Achzani, Noer Azam dan Kolopaking, Lala, Peranan Sektor Unggulan sebagai Salah Satu Faktor dalam Mengurangi Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi Papua Barat, *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 27, No. 2, Agustus 2016, pp. 119-136.
- Barney, J.B., *Gaining and Sustaining Competitive Advantage, Fourth Edition*, (Wesley: Addison, 2010), hlm.9.
- Boediono, *Ekonomi Moneter Edisi 3*, (Yogyakarta: BPFE, 2008), hlm. 48.
- David Hunger, J & Thomas L. Wheelen. *Strategic Management and Business Policy Achieving Sustainability. Twelfth Edition*, (Pearson Prentice Hall, 2010), hlm.245.
- Gaspersz, Vincent, *Statistika*, Bandung: Armico, 1989, hlm.8.
- Hadi, Giana, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Jakarta: PT. Setia Purna, 2009), hlm. 11.
- Irawan dan Suparmoko, M., *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: BPFE, 2011), hlm. 4-5.
- Jhingan, M.L., *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Edisi 1*, cetakan ke tujuh, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 53.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 1 Ayat (9)*, Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara RI
- Keratorop, Marianus; Widiatmaka; Suwardi, Arahana Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua, *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan* Vol. 6 No. 2 (Desember 2016): 141-150
- Kotler, Philip dan Armstrong, Gary, *Prinsip-prinsip Pemasaran. Edisi. 13. Jilid 1*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 230.
- Ma'aruf, Ahmad dan Wihastuti, Latri, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 9, No. 1, 2008, hlm. 44-45.
- Mahyudi, Akhmad, *Ekonomi Pembangunan dan Analisis Data Empiris*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 1.

- Manab, Abdul dan Sujianto, Agus Eko, *Pengaruh Stabilitas Ekonomi Makro terhadap Penerbitan Sukuk Negara di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam*, Tulungagung: Cahaya Abadi, 2016, hlm. 124.
- Mankiw, N. Gregory, *Makro Ekonomi Edisi Keenam*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 9.
- Matondang, Zulaika, Penerapan Metode Location Quotient (LQ) Dalam Penentuan Sektor Unggulan Di Pulau Sumatera Pada Tahun 2013 dan Kajiannya Dalam Perspektif Islam, *At-Tijarah*, Volume 1, No. 2, Juli-Desember 2015, hlm. 177.
- Murni, Asfia, *Ekonomi Makro*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 169.
- Pramita, Maria, Peranan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Dalam Perekonomian Wilayah Kabupaten Lampung Tengah, *Tesis*, Bandar Lampung: PPS Magister Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung, 2007.
- Prishardoyo, Bambang, Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Potensi Ekonomi terhadap Produk Domestik Regionalbruto (PDRB) Kabupaten Pati Tahun 2000-2005, *JEJAK*, Volume 1, Nomor 1, September, 2008, hlm.1.
- Rahardja, Prathama dan Manurung, Mandala, *Teori Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2008), hlm. 136.
- Retnandari, Nanuk Dwi, *Pengantar Ekonomi dalam Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 158.
- Saiman, L., *Kewirausahaan: Teori, Praktik, dan Kasus-Kasus, edisi kedua*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 128.
- Salvatore, Dominick, *Mikroekonomi Edisi Keempat*, (New York: McGraw-Hill Inc, 2006), hlm. 187.
- Sanudin; Awang, San Afri; Sadono, Ronggo dan Purwanto, Ris Hadi, Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Perekonomian Wilayah: Kasus Provinsi Lampung, *Jurnal Bumi Lestari*, Volume 15 No. 1, Pebaruari 2015, hlm. 10 .
- Scott, J., *A Matter of Record: Documentary Sources in Sosial Research*, Cambridge, UK: Polity Press, 1990.

- Sirojuzilam, *Disparitas Ekonomi dan Perencanaan Regional, Ketimpangan Ekonomi Wilayah Barat dan Wilayah Timur Provinsi Sumatera Utara*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hlm. 16.
- Sjafrizal. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi Cetakan Pertama*, (Padang: Baduouse Media, 2008), hlm. 86.
- Somantri, Ating dan Muhidin, Sambas Ali, *Aplikasi statistika dalam Penelitian*, Bandung: Pustaka Ceria, 2006, hlm.18.
- Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Alfabeta, 2012), hlm. 99.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: ALFABETA, 2014.
- Sukirno, Sadono, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 61.
- Tarigan, Robinson, *Ekonomi Regional- Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm.21.
- Tjiptono, Fandy, *Strategi Pemasaran, Edisi ketiga*, (Yogyakarta: ANDI, 2008), hlm. 225.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi, Edisi Ke Sembilan*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Todaro, Michael P. and Smith, Stephen C., *Economic Development. Eleventh Edition*, (United States: Addison Wesley, 2011), hlm. 92.
- Untoro, Joko, *Ekonomi*, (Jakarta: Kawahmedia, 2010), hlm. 39.
- Yurliana; M. Rachmad R .; Selamat Rachmadi, Analisis Sektor Ekonomi Unggulan di Kabupaten Batanghari, *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, Vol. 3 No. 2, Oktober-Desember 2015.

Lampiran 1: PDRB Propinsi Jawa Timur menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010, tahun 2014-2016 (Milliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2014	2015	2016
A	155,784.00	160,889.40	164,760.40
B	60,862.30	65,707.00	75,024.90
C	372,316.30	393,273.00	410,741.30
D	4,545.10	4,455.30	4,483.90
E	1,234.10	1,299.30	1,366.70
F	116,498.20	120,688.30	127,334.60
G	230,225.80	243,014.70	257,126.70
H	36,461.80	38,895.70	41,115.30
I	62,807.80	67,657.00	73,397.90
J	69,155.10	73,640.00	79,217.00
K	32,399.60	34,730.30	37,158.60
L	21,998.30	23,092.60	24,298.50
M,N	9,815.00	10,349.10	10,884.70
O	28,729.60	30,236.30	31,668.10
P	33,164.90	35,330.70	37,438.70
Q	8,212.80	8,743.30	9,245.40
R,S,T,U	18,473.70	19,374.40	20,298.20
PDRB	1,262,684.40	1,331,376.40	1,405,560.90

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Diolah (2018)

Lampiran 2: PDRB Kabupaten Tulungagung menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010, tahun 2014-2016 (Milliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2014	2015	2016
A	4,286,365.46	4,420,216.52	4,534,488.25
B	820,005.49	832,313.66	844,179.75
C	4,341,579.41	4,608,090.85	4,896,607.60
D	9,970.95	10,002.10	10,231.82
E	18,890.82	19,825.91	20,858.84
F	1,938,823.96	1,989,515.74	2,069,714.19
G	4,540,828.85	4,800,818.48	5,061,712.58
H	443,441.75	475,891.03	511,335.92
I	389,266.52	422,349.11	454,189.54
J	1,355,193.68	1,453,851.78	1,563,326.82
K	480,459.24	507,825.20	537,231.68
L	454,449.46	478,308.05	504,258.60
M,N	78,226.82	82,821.09	85,691.58
O	690,332.02	726,298.32	764,937.39
P	886,086.30	949,087.04	1,016,760.21
Q	244,846.56	249,721.95	257,588.19
R,S,T,U	286,426.27	299,687.80	313,323.60
PDRB ADHK	21,265,193.56	22,326,624.63	23,446,436.56

Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung, Diolah (2018)

Lampiran 3: Analisis Location Quotient (LQ) Kabupaten Tulungagung dengan Indikator PDRB Harga Konstan 2010 (Milliar Rupiah)

A

Thn	Eij	Ej	Ein	En	Eij/Ej	Ein/En	LQ
2014	4,286,365.46	21,265,193.56	155784	1262684	0.201567	0.123375	1.633773
2015	4,420,216.52	22,326,624.63	160889.4	1331376	0.19798	0.120844	1.638302
2016	4,534,488.25	23,446,436.56	164760.4	1405561	0.193398	0.11722	1.649864

B

Thn	Eij	Ej	Ein	En	Eij/Ej	Ein/En	LQ
2014	820005.49	21,265,193.56	60862.3	1262684	0.038561	0.048201	0.800007
2015	832313.66	22,326,624.63	65707	1331376	0.037279	0.049353	0.755359
2016	844179.75	23,446,436.56	75024.9	1405561	0.036005	0.053377	0.674532

C

Thn	Eij	Ej	Ein	En	Eij/Ej	Ein/En	LQ
2014	4341579.41	21,265,193.56	372316.3	1262684	0.204164	0.294861	0.692407
2015	4608090.85	22,326,624.63	393273	1331376	0.206394	0.295388	0.698722
2016	4896607.6	23,446,436.56	410741.3	1405561	0.208842	0.292226	0.71466

D

Thn	Eij	Ej	Ein	En	Eij/Ej	Ein/En	LQ
2014	9970.95	21,265,193.56	4545.1	1262684	0.000469	0.0036	0.130262
2015	10002.1	22,326,624.63	4455.3	1331376	0.000448	0.003346	0.133873
2016	10231.82	23,446,436.56	4483.9	1405561	0.000436	0.00319	0.136795

E

Thn	Eij	Ej	Ein	En	Eij/Ej	Ein/En	LQ
2014	18890.82	21,265,193.56	1234.1	1262684	0.000888	0.000977	0.908921
2015	19825.91	22,326,624.63	1299.3	1331376	0.000888	0.000976	0.909916
2016	20858.84	23,446,436.56	1366.7	1405561	0.00089	0.000972	0.914934

F

Thn	Eij	Ej	Ein	En	Eij/Ej	Ein/En	LQ
2014	1938823.96	21,265,193.56	116498.2	1262684	0.091174	0.092262	0.9882
2015	1989515.74	22,326,624.63	120688.3	1331376	0.08911	0.090649	0.983015
2016	2069714.19	23,446,436.56	127334.6	1405561	0.088274	0.090593	0.974399

G

Thn	Eij	Ej	Ein	En	Eij/Ej	Ein/En	LQ
2014	4540828.85	21,265,193.56	230225.8	1262684	0.213533	0.18233	1.171134
2015	4800818.48	22,326,624.63	243014.7	1331376	0.215027	0.182529	1.178041

2016	5061712.58	23,446,436.56	257126.7	1405561	0.215884	0.182935	1.180112
------	------------	---------------	----------	---------	----------	----------	----------

H

Thn	Eij	Ej	Ein	En	Eij/Ej	Ein/En	LQ
2014	443441.75	21,265,193.56	443441.75	1262684	0.020853	0.35119	0.059378
2015	475891.03	22,326,624.63	475891.03	1331376	0.021315	0.357443	0.059632
2016	511335.92	23,446,436.56	511335.92	1405561	0.021809	0.363795	0.059948

I

Thn	Eij	Ej	Ein	En	Eij/Ej	Ein/En	LQ
2014	389266.52	21,265,193.56	389266.52	1262684	0.018305	0.308285	0.059378
2015	422349.11	22,326,624.63	422349.11	1331376	0.018917	0.317227	0.059632
2016	454189.54	23,446,436.56	454189.54	1405561	0.019371	0.323138	0.059948

J

Thn	Eij	Ej	Ein	En	Eij/Ej	Ein/En	LQ
2014	1355193.68	21,265,193.56	69155.1	1262684	0.063728	0.054768	1.163597
2015	1453851.78	22,326,624.63	73640	1331376	0.065117	0.055311	1.177292
2016	1563326.82	23,446,436.56	79217	1405561	0.066677	0.05636	1.183053

K

Thn	Eij	Ej	Ein	En	Eij/Ej	Ein/En	LQ
2014	480459.24	21,265,193.56	32399.6	1262684	0.022594	0.025659	0.880526
2015	507825.2	22,326,624.63	34730.3	1331376	0.022745	0.026086	0.871934
2016	537231.68	23,446,436.56	37158.6	1405561	0.022913	0.026437	0.866713

L

Thn	Eij	Ej	Ein	En	Eij/Ej	Ein/En	LQ
2014	454449.46	21,265,193.56	454449.46	1262684	0.021371	0.359907	0.059378
2015	478308.05	22,326,624.63	478308.05	1331376	0.021423	0.359258	0.059632
2016	504258.6	23,446,436.56	504258.6	1405561	0.021507	0.35876	0.059948

M,N

Thn	Eij	Ej	Ein	En	Eij/Ej	Ein/En	LQ
2014	78226.82	21,265,193.56	9815	1262684	0.003679	0.007773	0.47325
2015	82821.09	22,326,624.63	10349.1	1331376	0.00371	0.007773	0.477217
2016	85691.58	23,446,436.56	10884.7	1405561	0.003655	0.007744	0.471948

O

Thn	Eij	Ej	Ein	En	Eij/Ej	Ein/En	LQ
2014	690332.02	21,265,193.56	28729.6	1262684	0.032463	0.022753	1.42677
2015	726298.32	22,326,624.63	30236.3	1331376	0.032531	0.022711	1.4324
2016	764937.39	23,446,436.56	31668.1	1405561	0.032625	0.022531	1.448027

P

Thn	Eij	Ej	Ein	En	Eij/Ej	Ein/En	LQ
2014	886086.3	21,265,193.56	33164.9	1262684	0.041668	0.026265	1.586437
2015	949087.04	22,326,624.63	35330.7	1331376	0.042509	0.026537	1.601886
2016	1016760.21	23,446,436.56	37438.7	1405561	0.043365	0.026636	1.628061

Q

Thn	Eij	Ej	Ein	En	Eij/Ej	Ein/En	LQ
2014	244846.56	21,265,193.56	8212.8	1262684	0.011514	0.006504	1.770224
2015	249721.95	22,326,624.63	8743.3	1331376	0.011185	0.006567	1.703174
2016	257588.19	23,446,436.56	9245.4	1405561	0.010986	0.006578	1.670218

R,S,T,U

Thn	Eij	Ej	Ein	En	Eij/Ej	Ein/En	LQ
2014	286426.27	21,265,193.56	18473.7	1262684	0.013469	0.01463	0.920629
2015	299687.8	22,326,624.63	19374.4	1331376	0.013423	0.014552	0.922398
2016	313323.6	23,446,436.56	20298.2	1405561	0.013363	0.014441	0.925355

Lapangan Usaha	Nilai LQ			Rerata LQ
	2014	2015	2016	
A	1.6338	1.6383	1.6499	1.64
B	0.8000	0.7554	0.6745	0.74
C	0.6924	0.6987	0.7147	0.70
D	0.1303	0.1339	0.1368	0.13
E	0.9089	0.9099	0.9149	0.91
F	0.9882	0.9830	0.9744	0.98
G	1.1711	1.1780	1.1801	1.18
H	0.0594	0.0596	0.0599	0.06
I	0.0594	0.0596	0.0599	0.06
J	1.1636	1.1773	1.1831	1.17
K	0.8805	0.8719	0.8667	0.87
L	0.0594	0.0596	0.0599	0.06
M,N	0.4733	0.4772	0.4719	0.47
O	1.4268	1.4324	1.4480	1.44
P	1.5864	1.6019	1.6281	1.61
Q	1.7702	1.7032	1.6702	1.71
R,S,T,U	0.9206	0.9224	0.9254	0.92

Lampiran 4: PDRB Kabupaten Trenggalek menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010, tahun 2014-2016 (Milliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2014	2015	2016
A	2,809.97	2,928.68	3,031.06
B	653.49	680.56	704.63
C	1,429.43	1,518.07	1,590.86
D	4.61	4.51	4.68
E	5.98	6.27	6.59
F	749.10	770.65	810.43
G	1,659.51	1,747.73	1,851.11
H	140.71	150.34	160.81
I	176.75	189.69	203.72
J	598.86	642.66	692.73
K	256.54	270.18	289.75
L	212.61	224.55	236.97
M,N	24.53	25.89	27.29
O	440.23	463.17	487.52
P	455.09	482.48	511.53
Q	92.01	93.37	99.08
R,S,T,U	289.14	302.75	317.78
PDRB ADHK	9,998.56	10,501.58	11,026.55

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek, Diolah (2018)

Lampiran 5: Analisis Location Quotient (LQ) Kabupaten Trenggalek dengan Indikator PDRB Harga Konstan 2010 (Milliar Rp)

A

Tahun	Eij	Ej	Ein	En	Eij/Ej	Ein/En	LQ
2014	2,809.97	9,998.56	155,784.00	1262684	0.281037	0.123375	2.277907
2015	2,928.68	10,501.58	160,889.40	1331376	0.27888	0.120844	2.307763
2016	3,031.06	11,026.55	164,760.40	1405561	0.274888	0.11722	2.345052

B

Tahun	Eij	Ej	Ein	En	Eij/Ej	Ein/En	LQ
2014	653.49	9,998.56	60,862.30	1262684	0.065359	0.048201	1.355971
2015	680.56	10,501.58	65,707.00	1331376	0.064806	0.049353	1.313111
2016	704.63	11,026.55	75,024.90	1405561	0.063903	0.053377	1.197195

C

Tahun	Eij	Ej	Ein	En	Eij/Ej	Ein/En	LQ
2014	1,429.43	9,998.56	,316.30	1262684	0.142964	0.294861	0.484852
2015	1,518.07	10,501.58	393,273.00	1331376	0.144557	0.295388	0.489379
2016	1,590.86	11,026.55	410,741.30	1405561	0.144275	0.292226	0.493712

D

Tahun	Eij	Ej	Ein	En	Eij/Ej	Ein/En	LQ
2014	4.61	9,998.56	4,545.10	1262684	0.000461	0.0036	0.128112
2015	4.51	10,501.58	4,455.30	1331376	0.00043	0.003346	0.128369
2016	4.68	11,026.55	4,483.90	1405561	0.000424	0.00319	0.132903

E

Tahun	Eij	Ej	Ein	En	Eij/Ej	Ein/En	LQ
2014	5.98	9,998.56	1,234.10	1262684	0.000598	0.000977	0.611857
2015	6.27	10,501.58	1,299.30	1331376	0.000597	0.000976	0.612105
2016	6.59	11,026.55	1,366.70	1405561	0.000598	0.000972	0.614997

F

Tahun	Eij	Ej	Ein	En	Eij/Ej	Ein/En	LQ
2014	749.10	9,998.56	116,498.20	1262684	0.074921	0.092262	0.812042
2015	770.65	10,501.58	120,688.30	1331376	0.073384	0.090649	0.809539
2016	810.43	11,026.55	127,334.60	1405561	0.073498	0.090593	0.811292

G

Tahun	Eij	Ej	Ein	En	Eij/Ej	Ein/En	LQ
2014	1,659.51	9,998.56	230,225.80	1262684	0.165975	0.18233	0.910297
2015	1,747.73	10,501.58	243,014.70	1331376	0.166426	0.182529	0.911778
2016	1,851.11	11,026.55	257,126.70	1405561	0.167877	0.182935	0.917687

H

Tahun	Eij	Ej	Ein	En	Eij/Ej	Ein/En	LQ
2014	140.71	9,998.56	36,461.80	1262684	0.014073	0.028876	0.487358
2015	150.34	10,501.58	38,895.70	1331376	0.014316	0.029215	0.490022
2016	160.81	11,026.55	41,115.30	1405561	0.014584	0.029252	0.498572

I

Tahun	Eij	Ej	Ein	En	Eij/Ej	Ein/En	LQ
2014	176.75	9,998.56	62,807.80	1262684	0.017677	0.049741	0.355383
2015	189.69	10,501.58	67,657.00	1331376	0.018063	0.050817	0.355453
2016	203.72	11,026.55	73,397.90	1405561	0.018475	0.05222	0.353803

J

Tahun	Eij	Ej	Ein	En	Eij/Ej	Ein/En	LQ
2014	598.86	9,998.56	69,155.10	1262684	0.059895	0.054768	1.093604
2015	642.66	10,501.58	73,640.00	1331376	0.061197	0.055311	1.10641
2016	692.73	11,026.55	79,217.00	1405561	0.062824	0.05636	1.11469

K

Tahun	Eij	Ej	Ein	En	Eij/Ej	Ein/En	LQ
2014	256.54	9,998.56	32,399.60	1262684	0.025657	0.025659	0.999925
2015	270.18	10,501.58	34,730.30	1331376	0.025728	0.026086	0.986266
2016	289.75	11,026.55	37,158.60	1405561	0.026278	0.026437	0.993989

L

Tahun	Eij	Ej	Ein	En	Eij/Ej	Ein/En	LQ
2014	212.61	9,998.56	21,998.30	1262684	0.021265	0.017422	1.220565
2015	224.55	10,501.58	23,092.60	1331376	0.021382	0.017345	1.232771
2016	236.97	11,026.55	24,298.50	1405561	0.021491	0.017287	1.243153

M,N

Tahun	Eij	Ej	Ein	En	Eij/Ej	Ein/En	LQ
2014	24.53	9,998.56	9,815.00	1262684	0.002453	0.007773	0.315563
2015	25.89	10,501.58	10,349.10	1331376	0.002466	0.007773	0.317183
2016	27.29	11,026.55	10,884.70	1405561	0.002475	0.007744	0.319647

O

Tahun	Eij	Ej	Ein	En	Eij/Ej	Ein/En	LQ
2014	440.23	9,998.56	28,729.60	1262684	0.04403	0.022753	1.935133
2015	463.17	10,501.58	30,236.30	1331376	0.044105	0.022711	1.942054
2016	487.52	11,026.55	31,668.10	1405561	0.044213	0.022531	1.962367

P

Tahun	Eij	Ej	Ein	En	Eij/Ej	Ein/En	LQ
-------	-----	----	-----	----	--------	--------	----

2014	455.09	9,998.56	33,164.90	1262684	0.045515	0.026265	1.732891
2015	482.48	10,501.58	35,330.70	1331376	0.045944	0.026537	1.731314
2016	511.53	11,026.55	37,438.70	1405561	0.046391	0.026636	1.741651

Q

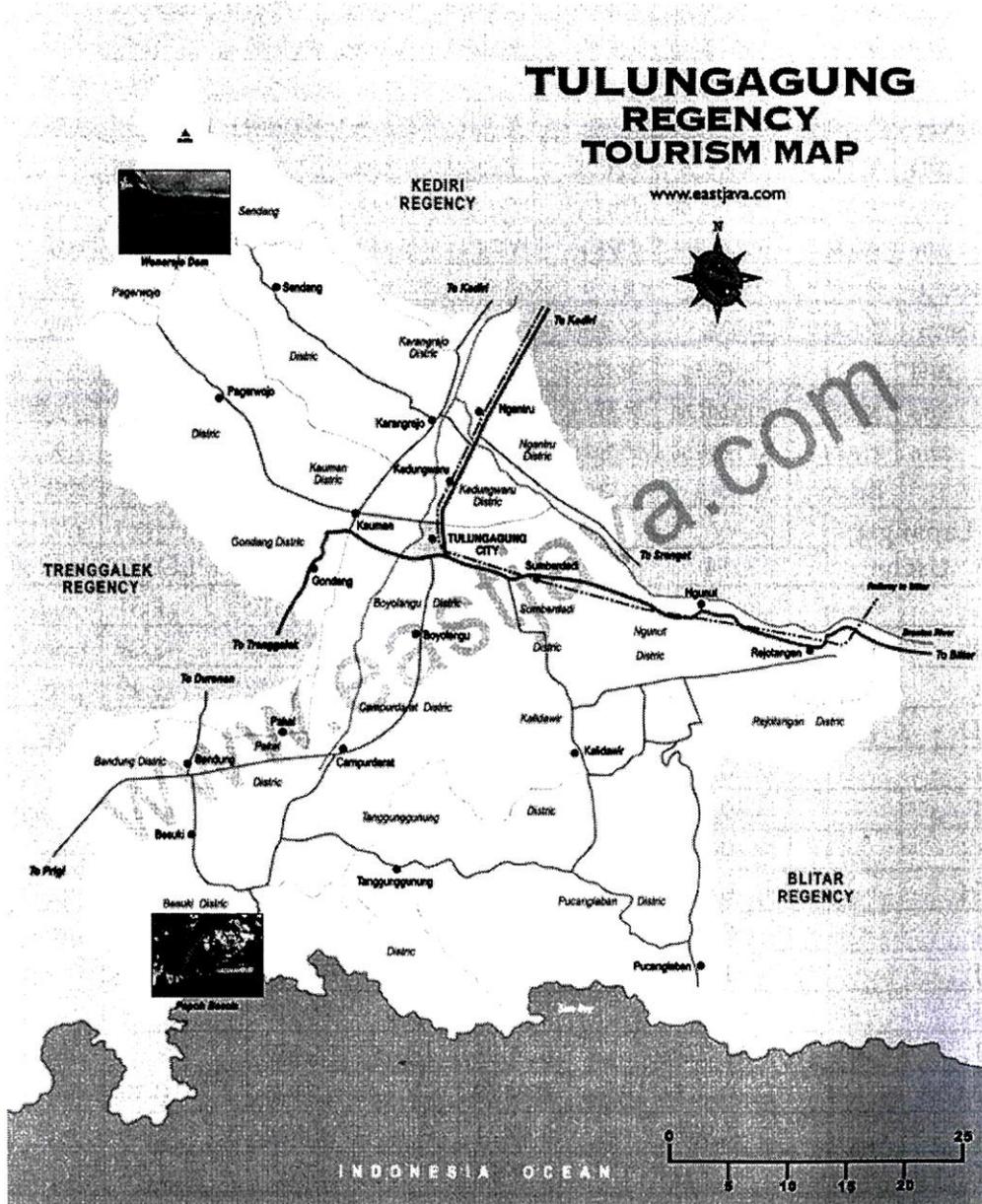
Tahun	Eij	Ej	Ein	En	Eij/Ej	Ein/En	LQ
2014	92.01	9,998.56	8,212.80	1262684	0.009202	0.006504	1.414785
2015	93.37	10,501.58	8,743.30	1331376	0.008891	0.006567	1.353908
2016	99.08	11,026.55	9,245.40	1405561	0.008986	0.006578	1.366054

R,S,T,U

Tahun	Eij	Ej	Ein	En	Eij/Ej	Ein/En	LQ
2014	289.14	9,998.56	18,473.70	1262684	0.028918	0.01463	1.976563
2015	302.75	10,501.58	19,374.40	1331376	0.028829	0.014552	1.981078
2016	317.78	11,026.55	20,298.20	1405561	0.02882	0.014441	1.995625

Lapangan Usaha	Nilai LQ			Rerata LQ
	2014	2015	2016	
A	2.2779	2.3078	2.3451	2.31
B	1.3560	1.3131	1.1972	1.29
C	0.4849	0.4894	0.4937	0.49
D	0.1281	0.1284	0.1329	0.13
E	0.6119	0.6121	0.6150	0.61
F	0.8120	0.8095	0.8113	0.81
G	0.9103	0.9118	0.9177	0.91
H	0.4874	0.4900	0.4986	0.49
I	0.3554	0.3555	0.3538	0.35
J	1.0936	1.1064	1.1147	1.10
K	0.9999	0.9863	0.9940	0.99
L	1.2206	1.2328	1.2432	1.23
M,N	0.3156	0.3172	0.3196	0.32
O	1.9351	1.9421	1.9624	1.95
P	1.7329	1.7313	1.7417	1.74
Q	1.4148	1.3539	1.3661	1.38
R,S,T,U	1.9766	1.9811	1.9956	1.98

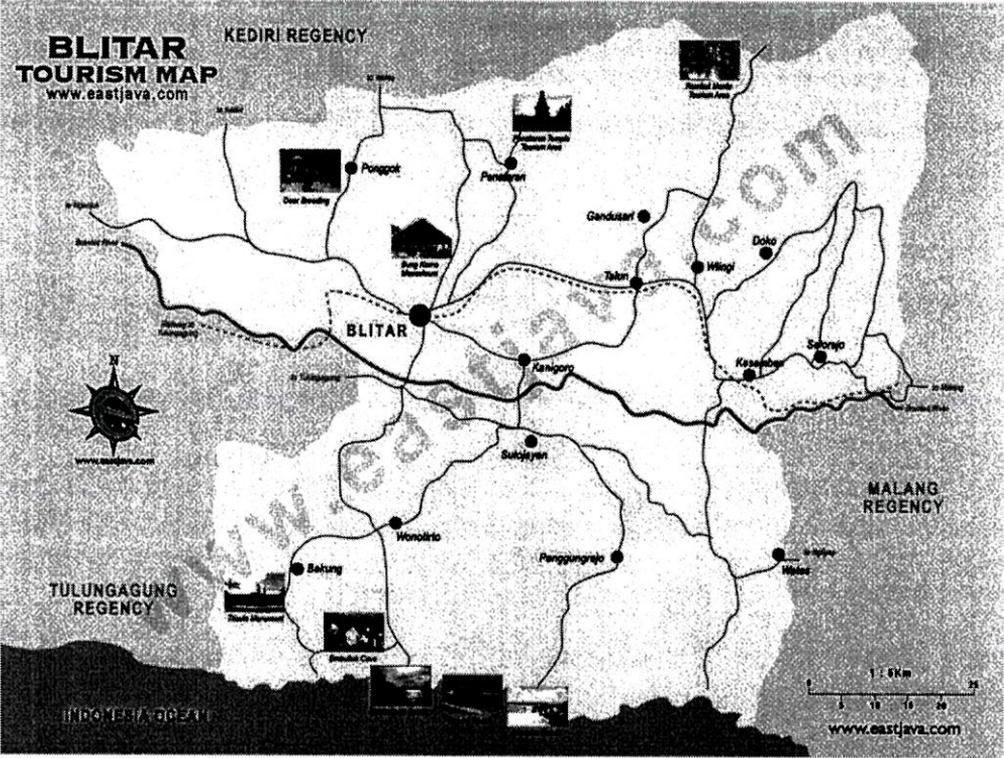
Lampiran 6: Peta Wilayah Kabupaten Tulungagung



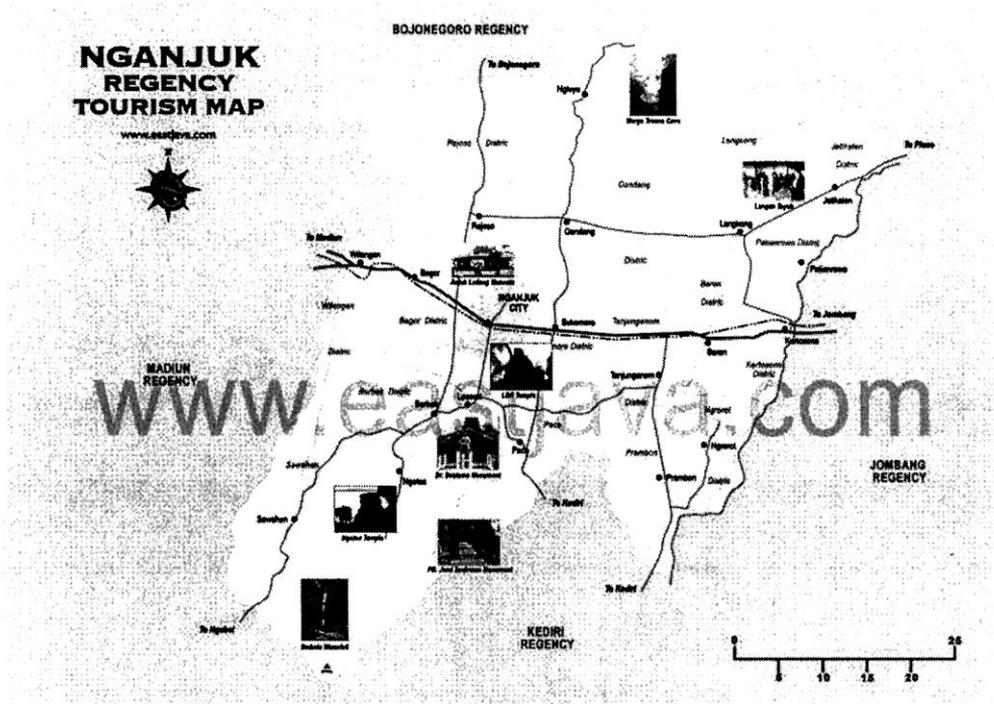
Lampiran 7: Peta Wilayah Kabupaten Trenggalek



Lampiran 9: Peta Wilayah Kabupaten Blitar



Lampiran 10: Peta Wilayah Kabupaten Nganjuk



ISBN 978-602-8569-62-0



9

786028

569620